



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 (17 April – 6 Mei 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI II	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	3
C. FUNGSI PENGAWASAN	3
KOMISI III	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	16
C. FUNGSI PENGAWASAN	16
KOMISI IV	20
A. FUNGSI LEGISLASI	20
B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	21

KOMISI V	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	24
C. FUNGSI PENGAWASAN	24
KOMISI VI	26
A. FUNGSI LEGISLASI	26
B. FUNGSI ANGGARAN	27
C. FUNGSI PENGAWASAN	27
KOMISI VII	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	32
C. FUNGSI PENGAWASAN	32
KOMISI VIII	35
A. FUNGSI LEGISLASI	35
B. FUNGSI ANGGARAN	35
C. FUNGSI PENGAWASAN	35
KOMISI IX	42
A. FUNGSI LEGISLASI	42

B. FUNGSI ANGGARAN	42
C. FUNGSI PENGAWASAN	42
KOMISI X	59
A. FUNGSI LEGISLASI	59
B. FUNGSI ANGGARAN	63
C. FUNGSI PENGAWASAN	63
KOMISI XI	69
A. FUNGSI LEGISLASI	69
B. FUNGSI ANGGARAN	69
C. FUNGSI PENGAWASAN	69
KOMISI XII	79
A. FUNGSI LEGISLASI	79
B. FUNGSI ANGGARAN	79
C. FUNGSI PENGAWASAN	79
KOMISI XIII	83
A. FUNGSI LEGISLASI	83
B. FUNGSI ANGGARAN	84
C. FUNGSI PENGAWASAN	86

BADAN LEGISLASI	88
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	101
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	119
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	120
BADAN ANGGARAN	123
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	124
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	127

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Melaksanakan Rapat Intern dengan Tim Asistensi Setjen DPR RI dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025.	Perumusan Draft RUU.	
2.		Melaksanakan RDPU dengan KPAI, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan dan ICT <i>Watch</i> dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025.	Mendapatkan masukan terkait perumusan Draf RUU.	
3.		Melaksanakan RDPU dengan AJI, PWI dan AVISI dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025.	Mendapatkan masukan terkait perumusan Draf RUU.	
4.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif	Melaksanakan RDPU dengan Pakar dan Akademisi dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.	Mendapatkan masukan terkait RUU Ratifikasi tersebut	
5.		Melaksanakan RDPU dengan Pakar dan Akademisi dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025.	Mendapatkan masukan terkait RUU Ratifikasi tersebut.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Bakamla, TNI AL	Kunjungan Kerja dilaksanakan pada 24 - 26 April 2025.	Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Lantamal VII, Kupang NTT dan Lantamal IV Batam, Kepri.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.		RDP dengan Kasal dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025.	Pengembangan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif.	
3.		Rapat Intern dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025.	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI.	
4.	Kementerian Luar Negeri	<i>Courtesy Call</i> dengan Dubes Prancis dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025.	Tertutup.	
5.	Kementerian Pertahanan	Raker dengan Kemhan, Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran pertahanan terhadap PDB; 2. Kesejahteraan Prajurit; 3. Penanganan dan Pengelolaan asset TNI; 4. Implementasi perjanjian (MoU) bidang pertahanan. 	
6.	Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pertahanan, dan BIN	Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 Mei 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Sumatera Barat. 2. Provinsi NTB. 3. Provinsi Maluku. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR/BPN RI	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN RI, membicarakan terkait evaluasi capaian program kerja dan pelaksanaan anggaran TA 2025, hari Senin, 21 April 2024.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN RI atas penyerapan anggaran Triwulan I TA 2025 sebesar Rp1.499.353.620.462,- (<i>satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah</i>) dari pagu efektif sebesar Rp4.442.962.422.000,- (<i>empat triliun empat ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah</i>) atau sebesar 33,75%.</p> <p>2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk mempercepat realisasi program dan kegiatan prioritas khususnya:</p> <p>a. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan mempercepat penyelesaian 17,8 juta hektar atau 25,2% yang belum terpetakan, 4,36 juta bidang</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>atau sebesar 3,46% yang belum terdaftar dan 30,1 juta bidang atau 23,88% yang belum bersertifikat hingga akhir TA 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah secara terintegrasi bersama Kementerian/Lembaga terkait, dengan memprioritaskan legalisasi terhadap aset umat yang telah tercatat namun belum tersertifikasi, guna memberi kepastian hukum atas tanah yang digunakan umat untuk beribadah. c. Memastikan kebijakan pemanfaatan tanah untuk mendukung program pertanian berkelanjutan dengan mengendalikan alih fungsi lahan melalui penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). d. Memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat, termasuk penyederhanaan proses administrasi dan pendampingan masyarakat hukum adat di daerah. <p>3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk segera menyampaikan dokumen lengkap terkait rincian pelaksanaan Program ILASP (<i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project</i>) yang didanai Bank Dunia kepada Sekretariat Komisi II DPR RI, terutama mengenai Kebijakan Satu Peta, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang responsif terhadap perubahan iklim.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk mengoptimalkan penyelesaian kasus – kasus pertanahan melalui tim bersama Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian ATR/BPN RI yang bisa dipantau secara <i>online</i> melalui <i>dashboard</i> pengaduan <i>atr.bpn.go.id</i>.</p>	
2.	<p>a. Kementerian PAN&RB RI b. BKN RI c. OIKN</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN&RB RI, Kepala Badan Kepegawaian RI, dan Kepala Otorita Ibukota Nusantara, dengan agenda membahas kebijakan penempatan ASN ke IKN, Digitalisasi pemerintahan desa, dll, hari Selasa, 21 April 2025.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian PAN RB untuk melakukan skema pemindahan Pegawai ASN dilakukan secara bertahap berdasar <i>timeline</i> yang terukur, jelas dan pasti dengan penapisan kelembagaan yang disesuaikan dengan kesiapan hunian dan infrastruktur perkantoran di IKN.</p> <p>2. Komisi II DPR RI meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pemindahan ASN ke IKN sesuai dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 14,4 triliun rupiah yang telah disetujui.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN RB untuk mengakselerasikan terwujudnya transformasi digital pemerintah sampai tingkat desa, sesuai dengan Arah Kebijakan Nasional untuk Tranformasi Digital Pemerintah dalam UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan mengutamakan pemanfaatan tata kelola digital.</p>	
3.	<p>a. Arsip Nasional RI</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p>	<p>1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>b. Lembaga Administrasi Negara c. Ombudsman RI</p>	<p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Arsip Nasional Indonesia, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Ombudsman RI, dengan agenda membahas program kerja Tahun 2025, hari Rabu, 23 April 2025.</p>	<p>sampai dengan April 2025, kepada mitra kerja sebagai berikut:</p> <p>a. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar Rp67.367.264.519,- (<i>enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah</i>) atau 28.41% dari pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp237.095.779.000,- (<i>dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah</i>).</p> <p>b. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp76.278.521.067,- (<i>tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah</i>) atau 38.10% dari pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp200.677.024.000,- (<i>dua ratus miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah</i>).</p> <p>c. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar Rp63.416.021.036,- (<i>enam puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah</i>) atau 33.10% dari pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp191.597.583.000,- (<i>seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah</i>).</p> <p>2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan LAN sebesar Rp100.855.974.210,- (<i>seratus miliar delapan ratus lima puluh lima juta</i></p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung tugas dan fungsi LAN sebesar Rp91.392.889.000,- (<i>sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah</i>). b. membiayai gaji 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahun 2024 sebesar Rp9.463.085.210,- (<i>sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah</i>). <p>3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan relaksasi blokir efisiensi belanja ANRI tahun 2025 sebesar Rp6.377.673.293,- (<i>enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah</i>) yang dialokasikan untuk pembangunan pusat khazanah arsip di Provinsi Riau.</p> <p>4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan anggaran ORI pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk disesuaikan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebelum efisiensi anggaran sebesar Rp44.882.000.000,- (<i>empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah</i>).</p> <p>5. Komisi II DPR RI mendorong LAN melakukan berbagai langkah inovasi berbasis kecerdasan buatan dalam pengembangan kompetensi ASN agar dapat mewujudkan ASN yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>6. Terhadap masih minimnya pengguna Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang aktif, Komisi II DPR RI meminta ANRI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pengguna aktif SRIKANDI di instansi pusat maupun instansi daerah.</p> <p>7. Untuk meningkatkan kualitas arsip yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, Komisi II DPR RI meminta ANRI untuk mengembangkan teknologi restorasi arsip yang memanfaatkan kecerdasan buatan.</p> <p>8. Komisi II DPR RI meminta kepada Ombudsman RI untuk menunjukkan kinerja nyata atas pengawasan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan juga lebih banyak proaktif dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi maupun inisiatif investigasi atas prakarsa sendiri.</p> <p>9. Dalam rangka meningkatkan kinerja ditengah efisiensi anggaran TA 2025, Komisi II DPR RI meminta ORI melakukan berbagai langkah percepatan dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat, terutama melalui kanal aplikasi pengaduan yang sudah didukung oleh teknologi kecerdasan buatan.</p>	
4.	Direktorat Jenderal Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p>	Setelah mendengar paparan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah sebagaimana amanat UU No. 23	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan agenda Pembahasan terkait RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah, hari Kamis, 24 April 2025.</p>	<p>Tahun 2014, Komisi II DPR RI meminta agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, melakukan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian dengan secepatnya draft Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah serta penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut untuk menjawab kebutuhan jumlah Daerah Otonom dalam rangka percepatan pembangunan nasional melalui pembangunan daerah setelah melalui evaluasi dan kajian mendalam. b. Penataan daerah termasuk di dalamnya pembukaan moratorium pemekaran daerah dengan persyaratan, kriteria dan indikator yang lebih ketat, jelas dan objektif sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan. 	
5.	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. <p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan agenda Penjelasan terkait BUMD, BLUD,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas manajemen BUMD dan BLUD. 2. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan inventarisasi nasional dan konsolidasi data 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dan Barang Milik Negara dan Pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, pada hari Kamis, 24 April 2025.	aset Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh dan terintegrasi, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempercepat proses sertifikasi aset daerah; b. Menyusun kebijakan pemanfaatan aset daerah secara produktif; dan c. Mendorong percepatan digitalisasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah. 3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan dan Pembinaan BUMD, yang melingkupi: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi komprehensif terhadap keberadaan dan kinerja seluruh BUMD dan Perusahaan Daerah di Indonesia; dan b. Kewajiban pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Menteri Dalam Negeri guna memastikan pengawasan substantif dan keterpaduan kebijakan pengelolaan BUMD. 4. Komisi II DPR RI mendukung Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengusulkan kepada Kementerian PAN-RB tentang pembentukan unit kerja baru berupa Direktorat Jenderal BUMD, yang secara khusus bertugas mengkoordinasikan kebijakan, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan seluruh BUMD secara nasional.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja, dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menguatkan pengawasan atas penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama yang sudah ditentukan penggunaannya (<i>earmarking</i>); b. Memastikan penggunaan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) selaras dengan prioritas pembangunan nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, penguatan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. Menekankan pentingnya peran Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal pelaksanaan Dana Transfer ke Daerah (TKD). 6. Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terhadap efektivitas pengelolaan dan pengawasan Dana Transfer ke Daerah.	
6.	a. Kementerian Dalam Negeri b. Gubernur Aceh c. Gubernur Jawa Timur d. Gubernur Banten e. Gubernur Bali f. Gubernur Sulawesi Selatan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI	Kesimpulan rapat pada tanggal 30 April 2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	g. Gubernur Sumatera Barat h. Gubernur Kalimantan Selatan i. Gubernur Jambi j. Gubernur Bangka Belitung k. Gubernur Kalimantan Utara l. Gubernur Maluku Utara m. Gubernur Papua Barat n. Gubernur Papua Selatan	dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Aceh, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua Barat, dan Gubernur Papua Selatan, dengan agenda Membahas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, membahas terkait dana transfer pusat ke daerah, membahas terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan membahas terkait pengelolaan kepegawaian, hari Senin, 28 April 2025.		
7.	a. Kementerian Dalam Negeri RI b. Gubernur D. I. Yogyakarta	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau	Kesimpulan rapat pada tanggal 30 April 2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	c. Gubernur Jawa Barat d. Gubernur Sumatera Utara e. Gubernur Kalimantan Timur f. Gubernur Riau g. Gubernur Lampung h. Gubernur Kalimantan Barat i. Gubernur Sulawesi Tengah j. Gubernur Sulawesi Utara k. Gubernur Nusa Tenggara Timur l. Gubernur Maluku m. Gubernur Papua Barat Daya n. Gubernur Papua Tengah	c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur D. I. Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya, Dan Gubernur Papua Tengah, dengan agenda Membahas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, membahas terkait dana transfer pusat ke daerah, membahas terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan membahas terkait		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		pengelolaan kepegawaian, hari Selasa, 29 April 2025.		
8.	a. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia b. Gubernur Papua c. Gubernur DK Jakarta, d. Gubernur Jawa Tengah, e. Gubernur Sumatera Selatan, f. Gubernur Bengkulu, g. Gubernur Kepulauan Riau, h. Gubernur Kalimantan Tengah, i. Gubernur Sulawesi Tenggara, j. Gubernur Sulawesi Barat, k. Gubernur Gorontalo, l. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dan m. Gubernur Papua Pegunungan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Papua, Gubernur DK Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Bengkulu, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Gorontalo, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dan Gubernur Papua Pegunungan, dengan agenda Membahas terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, membahas terkait dana transfer pusat ke daerah,	Kesimpulan rapat pada tanggal 30 April 2025.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		membahas terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan membahas terkait pengelolaan kepegawaian, hari Rabu, 30 April 2025,.		

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 6 Mei 2025 dengan: 1. Perwakilan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). 2. Perwakilan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN). 3. Dr. KP.H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA. (KAI).	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).	--

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Dirreskrim Polda Jabar; 2. Kuasa hukum korban penganiayaan Oriental Circus Indonesia (OCI); 3. Direksi PT Taman Safari Indonesia.	RDP dan RDPU Komisi III DPR RI pada tanggal 21 April 2025 dengan agenda menerima aspirasi masyarakat terkait dugaan penganiayaan pemain	-	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).		
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda Banten 2. Kejati Banten 3. BNNP dan BNNK Banten 	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah pada 28-30 April 2025 dengan agenda Kunspek dalam rangka fungsi Pengawasan “Penegakan Hukum Bidang Narkotika”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian maupun kendala yang dihadapi dan terus mendukung peningkatan kualitas kinerja Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Banten yang masih membutuhkan dukungan anggaran maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya untuk pemenuhan sumber daya organisasi. 2. Komisi III DPR RI meminta seluruh Mitra Kerja di Provinsi Banten untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik pada masing-masing tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat. 3. Komisi III DPR RI meminta agar kerja sama dalam bentuk koordinasi, kolaborasi, dan berbagai kegiatan bersama dapat terus ditingkatkan baik di dalam maupun luar instansi, baik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu maupun instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja yang terarah dan profesional. 	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya 2. Kapolres Metro Jakarta Timur 3. Keluarga Alm. Kenzha Ezra Walewangko 4. Kuasa Hukum Alm. Kenzha Ezra Walewangko 	RDP dan RDPU Komisi III DPR RI pada tanggal 30 April 2025 dengan agenda Menerima aspirasi masyarakat terkait meninggalnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas perkara nomor : LP/B/1904/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA terkait kasus kematian Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) atas nama Sdr. Kenzha Ezra Walewangko secara profesional, transparan, dan berkeadilan. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		(UKI) a.n Sdr. Kenzha Ezra Walewangko.	2. Komisi III DPR RI meminta kepada Polda Metro Jaya bekerja sama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan saksi dalam kasus meninggalnya Sdr. Kenzha Ezra Walewangko.	
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional	Raker Komisi III DPR RI pada tanggal 5 Mei 2025 dengan agenda Meminta penjelasan terkait: 1. Pemetaan jaringan, jalur peredaran, dan kawasan rawan narkoba, serta upaya pemberantasan. 2. Optimalisasi fungsi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 3. Pola sinergitas dan koordinasi dengan Lembaga lainnya. 4. Pelaksanaan tupoksi dan hambatan.	-	
5.	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Raker Komisi III DPR RI pada tanggal 6 Mei 2025 dengan agenda meminta penjelasan terkait : 1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Rencana kerja dan program prioritas, kendala serta kebutuhan dalam upaya optimalisasi penyelamatan dan pemulihan keuangan negara		

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Rapat Internal Panja RUU Kehutanan Komisi IV dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025 pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Kepala Badan Keahlian DPR RI; 2. Penyerahan Konsep RUU beserta Naskah Akademik; dan 3. Pembahasan Rencana Kerja RUU tentang Kehutanan. 	--
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Rapat Internal Panja RUU Pangan Komisi IV dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2025 pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Kepala Badan Keahlian DPR RI; 2. Penyerahan Konsep RUU beserta Naskah Akademik; dan 3. Pembahasan Rencana Kerja Panja RUU tentang Pangan. 	
3.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012	RDP Panja RUU Pangan dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2024 pukul 13.00 WIB dengan menghadirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 2. Kementerian Pertanian; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Badan Pangan Nasional; 5. Badan Gizi Nasional; 6. Perum BULOG. 	Meminta masukan terkait dengan Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 pukul 10.00 WIB.	Pembahasan mengenai Efisiensi Anggaran (Blokir) Kementerian Kelautan dan Perikanan.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal Komisi IV dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 pukul 11.00 WIB.	Menyusun Program Kerja Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.	
2.	Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Magetan	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 pukul 10.00 WIB.	Koordinasi/Konsultasi terakit Program Pemerintah Pusat di Bidang Pertanian untuk Kab. Magetan di TA 2025.	
3.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal Komisi IV dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 pukul 13.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi; dan 4. Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja Pengawasan Penyerapan Gabah 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Pimpinan dan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 pukul 09.00 WIB.	Pembahasan serapan gabah petani Tahun 2025.	
5.	Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan (ANPG) Provinsi Gorontalo	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 pukul 11.00 WIB.	Diskusi tentang persoalan nelayan-nelayan yang terjadi di Provinsi Gorontalo.	
6.	Pimpinan dan Anggota Panja Pengawasan tentang Penyerapan Gabah dan Jagung	Rapat Internal Panja Pengawasan tentang Penyerapan Gabah dan Jagung dilaksanakan pada 29 April 2025 pukul 10.00 WIB.	1. Kerangka Acuan Kerja/ <i>Term of Reference</i> ; dan 2. Rencana Kerja Panja Pengawasan tentang Penyerapan Gabah dan Jagung.	
7.	Direksi Perum Bulog	Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025.	Meninjau dan diskusi lapangan ke lokasi Sentra Penggilingan Padi (SPP) Perum Bulog terkait penyerapan gabah dan jagung.	
8.	Pimpinan dan Anggota Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Rapat Internal Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 pukul 10.00 WIB.	1. TOR/Kerangka Acuan Kerja; dan 2. Rencana Kerja Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi.	
9.	1. Bupati Gresik; 2. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; 3. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero);	Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI Masa Sidang III	1. Peninjauan ke tempat Pengecer/Kios Sahabat Tani di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik; 2. Meninjau gudang Distributor Anak Gresik Raya Kencana (AGRK);	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	4. Direksi PT Petrokimia Gresik; 5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur; serta 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 2-4 Mei 2025.	3. Meninjau dan diskusi di PT Petrokimia Gresik.	
10.	1. Bupati Jombang; 2. Direksi Perum BULOG; 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur; 4. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Jombang; dan 5. Petani/Gapoktan	Kunjungan Kerja Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2-4 Mei 2025.	Meninjau dan Diskusi di Gudang Bulog Trunggono Kabupaten Jombang mengenai Penyerapan Gabah/Jagung di Kabupaten Jombang.	
11.	1. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) 2. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 3. Asosiasi Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (PEJAGINDO) 4. Presidium Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)	Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.	Menerima aspirasi, masukan, dan saran terkait kebijakan penyerapan gabah dan jagung.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Perhubungan; - Maskapai Penerbangan; - Badan Usaha Jalan Tol (BUJT); - KNKT; - Perum LPPNPI (Airnav); 2. Kementerian Pekerjaan Umum; 3. BMKG; 4. BNPP/Basarnas; 5. Korlantas Polri.	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025.	Dalam Rangka Membahas Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi Pada Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2025.	
2.	1. Kementerian Desa dan PDTT; 2. Kementerian Transmigrasi.	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2025.	1. Membahas Program Kerja APBN TA 2025 (pagu sebelum dan sesudah efisiensi); 2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman;	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Program Kerja APBN TA 2025 (pagu sebelum dan sesudah efisiensi); 2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024. 	
4.	DPRD Kabupaten Wajo	Audiensi dilaksanakan pada hari Selasa, 30 April 2025.	Membahas Inpres jalan Daerah (IJD) dan Infrastruktur lainnya.	
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); 2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). 	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Program Kerja APBN Tahun Anggaran 2025 (pagu sebelum dan setelah efisiensi); 2. Membahas Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2024; 3. Lain-lain. 	
6.	DPRD Kabupaten Sampang	Audiensi dilaksanakan pada hari Selasa, 6 mei 2025.	Dalam rangka konsultasi tentang analisis dampak lingkungan pembangunan jalan daerah.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Rapat Intern dilaksanakan tanggal 23 April 2025.	Pembentukan Panja RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR RI.	
2.	RUU tentang Perlindungan Konsumen	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025.	<i>Progress report</i> terkait penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen serta masukan substansi dari Komisi VI.	
3.	RUU tentang Perlindungan Konsumen	Panja Penyusunan NA dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan masukan terkait Penyusunan NA dan RUU tentang Perlindungan Konsumen. 2. Izin jasa pengiriman pada perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>). 	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta. 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 	Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan tanggal 30 April 2025.	Mendapatkan masukan terkait Penyusunan NA dan RUU tentang Perlindungan Konsumen.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	1. Prof Dr. Rizal Edy Halim, 2. Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI., 3. Prof. Andri Wibisono, S.H., LL.M. dan	Panja Penyusunan NA dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan tanggal 30 April 2025.	Mendapatkan masukan baik secara substansi <i>teoritical</i> , <i>practical</i> maupun <i>gramatical</i> penulisan atas Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Komisi VI DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan tanggal 21 April 2025.	Penyusunan dan Pembahasan Program Kerja Komisi VI DPR RI MP. III TS. 2024-2025.	
2.	Komisi VI DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan tanggal 21 April 2025.	Penetapan Program Kerja Komisi VI DPR RI MP. III TS. 2024-2025.	
3.	1. Perum Jasa Tirta I beserta Subholdingnya 2. Perum Jasa Tirta II beserta Subholdingnya	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 23 April 2025.	Tindaklanjut penyelesaian permasalahan Kreditur PT Istaka Karya (Persero) Peninjauan operasional <i>Hyperscale Data Center</i> .	
4.	1. Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB). 2. Masyarakat Desa Gobah Kecamatan Tambang.	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 28 April 2025.	1. Audiensi terkait penolakan Masyarakat Adat Tempatan Pulau Rempang perihal keberadaan PSN Rempang <i>Eco City</i> yang akan menyingkirkan masyarakat dan menghilangkan identitas kultural Masyarakat Melayu, dan 2. Audiensi terkait permohonan/bantuan pengembalian	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tanah ulayat yang dimanfaatkan PTPN Kebun Sei Pagar. (Pengaduan Masyarakat)	
5.	Paguyuban Karyawan PT Kertas Leces (Persero)	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 28 April 2025.	Audiensi terkait Permohonan Advokasi karyawan PT Kertas Leces untuk mendapatkan hak – hak normatif berupa gaji terhutang dan pesangon terhutang yang di bayar oleh manajemen PT Kertas Leces. (Pengaduan Masyarakat)	
6.	Perum Perhutani	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 29 April 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan mitra kerja Komisi VI DPR 2. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025 4. Tindaklanjut Tindak lanjut hasil RDPU dengan SEKAR PERHUTANI 	
7.	Perum Bulog	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 29 April 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024. 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025. 3. <i>Progress report</i> Implementasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. 4. Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional 5. Lain-lain. 	
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan Pensiunan BUMN Strategis (P2BUMNS) 2. Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKB MKT) 	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 5 Mei 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024 2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025 3. <i>Progress report</i> Implementasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. 4. Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Lain-lain.	
9.	1. Wakil Menteri BUMN 2. Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur 3. Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) 4. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk 5. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 6. Perwakilan Korban BUMN Istaka Karya	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 6 Mei 2025.	Tindaklanjut penyelesaian permasalahan Kreditur PT Istaka Karya (Persero)	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	Rapat Internal Panja Komisi VII dengan Wamen dan Sesmen Kementerian Pariwisata dilaksanakan pada hari Senin, 21 April 2025. pukul 10.00 WIB.	Melaporkan pokok-pokok perubahan DIM dalam RUU Kepariwisataaan.	
2.		Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 21 April 2025. pukul 14.00 WIB dengan: 1. Menteri Pariwisata RI; 2. Menteri PAN-RB RI; 3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI; 2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI; 3. Menteri Hukum RI; 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI; 5. Menteri Kebudayaan RI.	Melanjutkan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka penyampaian hasil konsolidasi DIM Pemerintah terhadap RUU tentang Kepariwisataaan.	
3.		RDP Panja RUU tentang Kepariwisataaan Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa 22 April, Rabu 23 April, Kamis 24 April 2025, pukul 14.00 WIB dengan Pejabat Eselon I dan menghadirkan ahli bahasa: 1. Kementerian Pariwisata RI; 2. Kementerian PAN-RB RI;	Melanjutkan pembahasan DIM sesuai hasil konsolidasi Pemerintah.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI; 3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI; 4. Kementerian Hukum RI; 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI; 6. Kementerian Kebudayaan RI. 		
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<p>RDP Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin 28 April, pukul 19.00 WIB dengan Pejabat Eselon I dan menghadirkan ahli bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pariwisata RI; 2. Kementerian PAN-RB RI; 3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI; 4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI; 5. Kementerian Hukum RI; 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI; 7. Kementerian Kebudayaan RI. 	Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kepariwisataan.	
5.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<p>RDP Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa 29 April, pukul 19.00 WIB dengan Pejabat Eselon I dan menghadirkan ahli bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pariwisata RI; 2. Kementerian PAN-RB RI; 	Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kepariwisataan.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI; 4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI; 5. Kementerian Hukum RI; 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI; 7. Kementerian Kebudayaan RI.		
6.		Kunjungan Kerja Luar Negeri Panitia Kerja Komisi VII DPR RI ke Federasi Rusia dilaksanakan pada hari Minggu 4 Mei s.d. 10 Mei 2025.	Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (RUU tentang Kepariwisataaan).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan Komisi VII DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Kamis 17 April 2025, pukul 11.00 WIB.	4. Penyusunan Program Kerja Komisi VII DPR RI; 5. Lain-lain.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Pimpinan dengan Anggota Komisi VII DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada hari Kamis 17 April 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Penyusunan Program Kerja Komisi VII DPR RI; 2. Lain-lain.	
3.	1. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Candi Borobudur didampingi Pengacara Publik dari YLBHI LBH Yogyakarta, 2. Perwakilan pedagang kaki lima dari Paguyuban SKMB Borobudur, dan; 3. Komunitas UMKM Yogyakarta	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Kamis 24 April 2025, pukul 14.00 WIB.	Permohonan dan kronologi yang kami terima, persoalan ini tidak hanya menyangkut persoalan mata pencaharian semata, tetapi juga menyentuh aspek partisipasi, informasi publik, perlindungan hukum, dan bahkan dugaan intimidasi serta diskriminasi terhadap warga negara. Tentu ini menjadi perhatian serius.	
4.	1. Asosiasi Industri Tekstil 2. Asosiasi Industri Baja 3. Asosiasi Industri Agro dan Pangan 2. Asosiasi Industri Kesehatan 3. Asosiasi Industri Semen	Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan pada hari Senin 28 April 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Dampak Kebijakan Insentif Tarif dari Pemerintah Amerika Serikat. 2. Lain-lain.	
5.	Kepala Badan Standardisasi Nasional	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Senin 28 April 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Penguatan Standardisasi Nasional dalam menjawab Tantangan Perekonomian Global; 2. Lain-lain.	
6.	1. Komisi II DPRD Banjarbaru 2. Perwakilan Aliansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PUMKM) Kalimantan Selatan	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Selasa 29 April 2025, pukul 12.00 WIB.	Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pemberdayaan dan perlindungan UMKM, tema yang sangat relevan dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Menteri Perindustrian RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Selasa 29 April, pukul 14.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implikasi Kebijakan Perdagangan Amerika Serikat terhadap Daya Saing Industri Nasional; 2. Arah Kebijakan dan Implementasi Insentif bagi Pengembangan Sektor Industri Nasional; 3. Lain-lain. 	
8.	Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu 30 April, pukul 10.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi Ekonomi Kreatif; 2. Lain-lain. 	
9.	Menteri UMKM RI	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu 30 April, pukul 14.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM; 2. Lain-lain. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BP Haji RI; 2. Sekjen Kementerian Agama RI; 3. Dirjen PHU Kementerian Agama RI; 4. Dirut PT. Garuda Indonesia; 5. Dirut PT. Lion Air; 6. Kapuskes Haji Kemenkes RI. 	<p>Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis, 17 April 2025, pukul 14.00 WIB s.d selesai.</p>	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT. Lion Air membahas “Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dan Isu-isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama, Badan Pelaksana Haji dan Puskes Haji Kementerian Kesehatan untuk melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M secara detail baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, disertai upaya mitigasi dan langkah-langkah antisipatif agar jemaah haji mendapat pelayanan yang maksimal, aman dan nyaman. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk memastikan upaya maksimal dalam pengisian kuota, persyaratan istitha'ah, kesiapan asrama haji dan pelayanan <i>one stop service</i> di asrama haji, termasuk program khusus di Armuzna seperti safari wukuf, skema murur dan tanazul. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan imigrasi Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan kesiapan <i>fast track</i> untuk jemaah haji di embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Utama PT. Lion Air untuk fokus dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dan Padang. 5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI untuk proses pemeriksaan istitha'ah kesehatan dapat dilakukan secara objektif, menyusun skenario penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, dan memastikan ketersediaan obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis yang terakreditasi di Arab Saudi. 6. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Haji untuk meningkatkan koordinasi dalam monitoring persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, serta upaya-upaya untuk perbaikan pelayanan kepada jemaah haji. 7. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama RI untuk mengkoordinasikan pengembalian 36 kloter slot penerbangan PT Garuda Indonesia sesuai RPH dari Madinah ke Jeddah. Apabila tetap terbang lewat Madinah 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
			<p>maka konsekuensi pembiayaan akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.</p> <p>8. Komisi VIII DPR RI mendesak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Sekretaris Jenderal dan Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Kepala Puskes Haji Kemenkes RI, Dirut PT. Garuda dan Dirut PT. Lion Air agar memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendesak Badan Penyelenggara Haji untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur penyelenggara haji dalam rangka kesiapan menjadi penyelenggara ibadah haji pada tahun 1447 H/2026 M. b. Memastikan ketercukupan sarana dan prasana bagi jemaah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). c. Memastikan asrama haji embarkasi Banten dapat difungsikan pada musim haji tahun ini. d. Mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama untuk meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi tambahan biaya yang ditanggung jemaah di luar yang sudah ditentukan. 	
2.	<p>Kepala BP Haji RI, Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Para Kepala UPT Embarkasi Haji Indonesia, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Lion Air dan Dirut PT. Saudi Airlines.</p>	<p>RAKER, RDP dan RDPU dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025, pukul 13.00 WIB s.d. selesai.</p>	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta, Bekasi, Medan, Aceh, Padang, Surabaya, Lombok, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Kepala Asrama Haji Batam dan Palembang, Direktur Niaga PT. Garuda Indonesia, serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Produksi PT. Lion Air dan Direktur Utama PT. Saudi Airlines membahas</p>	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
			<p>“Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dan Isu-isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji yang menggunakan visa non-haji karena dilarang oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk memastikan laporan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar Syarikah MCDC, Rawaf Mina dan Rehlat&Manafea memenuhi standar pelayanan dalam makanan siap saji. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak PT. Garuda Indonesia, PT. Lion Air dan PT. Saudi Airlines untuk memberikan pelayanan khusus kepada jemaah haji disabilitas dan lansia serta menghindari terjadinya permasalahan teknis yang dapat menghambat keberangkatan dan/atau kepulangan jemaah haji. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan dan kesiapan operasional dalam penyelenggaraan ibadah haji, menyusun mitigasi di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta, Bekasi, Medan, Aceh, Padang, Surabaya, Lombok, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Batam, Palembang, Indramayu, dan Solo, serta memastikan penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah penyediaan sarana dan prasarana bagi jemaah haji. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
			<p>5. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI agar memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan penerbangan jemaah haji melalui PT. Garuda Indonesia, PT. Lion Air dan PT. Saudi Airlines tepat waktu sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan, apabila terjadi keterlambatan bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut, serta memberikan edukasi kepada jemaah haji dalam menggunakan semua fasilitas di pesawat. b. Mencabut ijin operasional PIHK atau PPIU yang memberangkatkan jemaah haji non-visa haji. c. Melaporkan travel atau pihak-pihak yang memberangkatkan jemaah haji tanpa memiliki izin sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. d. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelayanan kepada jemaah haji. e. Meningkatkan kualitas layanan asrama haji setara dengan hotel bintang 3. f. Meningkatkan sosialisasi kepada jemaah haji mengenai skema murur, tanazul, dan safari wukuf. 	
3.	Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025, pukul 13.00 WIB s.d. selesai.	Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
	<p>Umrah Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Direktur Niaga PT. Garuda Indonesia serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Produksi PT. Lion Air dan Direktur GSA Saudi Airlines</p>		<p>Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Direktur Niaga PT. Garuda Indonesia serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Produksi PT. Lion Air dan Direktur GSA Saudi Airlines membahas “Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dan Isu-isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mendesak seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan serapan kuota haji tahun 1446 H/2025 M, sehingga tidak ada kuota haji reguler yang tersisa. 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI untuk mengoordinasikan PIHK agar memaksimalkan pemenuhan kuota haji khusus. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak para maskapai penerbangan haji untuk memastikan tidak ada keterlambatan penerbangan dan jika terjadi keterlambatan maka harus memenuhi hak-hak jemaah haji sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji, para Kepala Kanwil Kemenag di setiap provinsi, para Kepala UPT. Asrama Haji, dan para maskapai penerbangan agar dapat mengantisipasi masalah-masalah yang muncul di lapangan. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	AGENDA	KETERANGAN
			5. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Haji, para Kepala Kanwil Kemenag dan maskapai penerbangan agar memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan para petugas haji dapat memberikan pelayanan khusus kepada jemaah haji lansia dan disabilitas. b. Meningkatkan peran embarkasi antara dan embarkasi transit dalam mendukung pelayanan kepada jemaah haji. c. Meningkatkan sosialisasi kepada para jemaah haji untuk tidak membawa barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. 	
4.	Kunjungan Kerja Embarkasi	Kunjungan Kerja Asrama Haji Embarkasi (Agama) dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2025	Kunjungan Kerja Embarkasi Haji ke Medan Provinsi Sumatera Utara.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Rapat Internal Panja RUU dengan agenda Penyusunan program kerja dan kegiatan Panja dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025, pukul 13.00 WIB.	Rapat Tertutup.	
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Rapat Internal Panja RUU dengan agenda Penyusunan program kerja dan kegiatan Panja dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025, pukul 13.30 WIB.	Rapat Tertutup.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Pimpinan Komisi IX DPR RI	Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda: 1. Penyusunan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. 2. Pembentukan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga	Rapat Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Ketua Panja Ibu drg. Putih Sari).</p> <p>3. Penetapan Ketua dan Anggota Panja Pengawasan.</p> <p>Bid. Kesehatan:</p> <p>1. Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Percepatan Eliminasi Tuberculosis (Ketua Panja Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.).</p> <p>2. Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. (Ketua Panja Bapak M. Yahya Zaini, S.H.).</p> <p>Bid. Ketenagakerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Pelindungan Tenaga Kerja Migran (Ketua Panja Bapak Charles Honoris). 		
2.	Rapat Internal Komisi IX DPR RI	Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda:	Rapat Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. 2. Pembentukan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Penetapan Ketua dan Anggota Panja Pengawasan. Bid. Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Percepatan Eliminasi Tuberculosis 2. Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. Bid. Ketenagakerjaan: <ul style="list-style-type: none"> • Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Pelindungan Tenaga Kerja Migran 		
3.	Jaminan Kesehatan Nasional	Rapat Internal Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Penyusunan program kerja dan kegiatan Panja	Rapat Tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025, pukul 10.00 WIB.		
4.	Percepatan Eliminasi <i>Tuberculosis</i>	Rapat Internal Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Penyusunan program kerja dan kegiatan Panja dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025, pukul 11.00 WIB.	Rapat Tertutup.	
5.	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia	RDPU/Audiensi dilaksanakan pada hari Kamis, 24 April 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda Usulan Perbaikan Regulasi dan Implementasi Program Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas informasi yang diberikan terkait Usulan Perbaikan Regulasi dan Implementasi Program Kesehatan sebagaimana terlampir. 2. Komisi IX DPR RI akan menyampaikan informasi tersebut dalam rapat-rapat dengan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI. 	
6.	DPRD Kabupaten Cirebon	RDPU/Audiensi dilaksanakan pada hari Kamis, 24 April 2025, pukul 12.00 WIB dengan agenda Problematika UHC BPJS di Kabupaten Cirebon.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi DPRD Kabupaten Cirebon atas informasi yang diberikan terkait Problematika UHC BPJS di Kabupaten Cirebon. 2. Komisi IX DPR RI akan menyampaikan permasalahan DPRD Kabupaten Cirebon dalam rapat-rapat dengan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI. 	
7.	Pelindungan Tenaga Kerja Migran	Rapat Internal Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI dengan agenda Penyusunan program kerja dan kegiatan Panja dilaksanakan pada hari	Rapat Tertutup	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Kamis, 24 April 2025, pukul 13.30 WIB.		
8.	DPRD Kabupaten Pemalang	RDPU/Audiensi dengan agenda Konsultasi Dukungan Kebijakan Anggaran untuk Pembangunan RSUD dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025, pukul 11.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi DPRD Kabupaten Pemalang atas informasi yang diberikan terkait Konsultasi Dukungan Kebijakan Anggaran untuk Pembangunan RSUD. 2. Komisi IX DPR RI akan menyampaikan permasalahan DPRD Kabupaten Pemalang dalam rapat-rapat dengan Mitra Kerja Komisi IX DPR RI. 	
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI 2) Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI 3) Atase Ketenagakerjaan di Arab Saudi. 	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas rencana pencabutan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. 2. Membahas implementasi tata kelola pelindungan yang komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum keberangkatan, selama bekerja dan kepulangan ke tanah air. 3. Membahas penguatan peran Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) dalam hal pengawasan dan perlindungan serta integrasi data Pekerja Migran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk segera mengupayakan adanya perjanjian kerja sama bilateral (<i>Government to Government/G-to-G</i>) dengan Arab Saudi dalam rangka pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 2. Komisi IX DPR RI mendukung pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan catatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI segera memastikan adanya pemenuhan prinsip jaminan pelindungan maksimal terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk adanya perjanjian kerja yang adil dengan pemberi kerja berbadan hukum, kepastian sistem pemantauan evaluasi, jaminan sosial, gaji minimum, jam kerja layak, dan kepastian hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi dengan sistem pemerintahan Arab Saudi dan hukum internasional. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI untuk mengoptimalkan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Indonesia (PMI) di Arab Saudi.</p> <p>4. Membahas mekanisme pemberian bantuan hukum dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi dan kekerasan.</p> <p>5. Evaluasi penanganan PMI yang menjadi korban TPPO khususnya di negara Kamboja, Myanmar dan Laos.</p>	<p>tata kelola perlindungan PMI sebelum keberangkatan, selama bekerja dan setelah bekerja serta memberikan bantuan hukum bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan hukum melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem layanan pengaduan 24 Jam (<i>Crisis Centre KP2MI</i>), b. Koordinasi pendampingan hukum di negara penempatan dengan K/L terkait, c. Peningkatan kapasitas SDM dan kerja sama lintas kementerian/lembaga. <p>4. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI dan K/L terkait untuk memperkuat pencegahan terhadap PMI non prosedural dan PMI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).</p> <p>5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini paling lambat 5 Mei 2025.</p>	
10.	Menteri Kesehatan RI	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan isu-isu krusial di sektor kesehatan, Permasalahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) termasuk evaluasi sistem pendidikan pembiayaan, distribusi peserta didik, dan kejelasan status hubungan kerja. 	<p>1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI mengambil langkah strategis dan komprehensif dalam menyikapi kasus perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, rumah sakit pendidikan, Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, Majelis Disiplin Profesi, lembaga profesi terkait lainnya melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola PPDS, termasuk melakukan tes kejiwaan seperti MMPI (<i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i>), guna menciptakan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>2) Persiapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji tahun 2025, mencakup kesiapan tenaga kesehatan, logistik obat dan alat kesehatan, serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan yang optimal bagi jamaah haji Indonesia.</p>	<p>ekosistem PPDS yang aman, beretika, dan profesional;</p> <p>b. Memperketat pengawasan pelaksanaan PPDS dengan penerapan mekanisme audit berkala, penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus yang adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>c. Memberikan sanksi tegas dan memberikan efek jera kepada para pelaku dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tugas, pokok, fungsi Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>d. Bersama para pihak terkait, memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, perundungan, dan pelecehan seksual dengan pendampingan psikologis dan bantuan hukum secara menyeluruh,</p> <p>e. Mengoptimalkan <i>hotline</i> kanal perundungan dan memperkuat <i>whistle blower system</i> dengan memastikan pelaporan yang aman dan rahasia.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan evaluasi dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya terkait pembenahan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.</p> <p>3. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan haji Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk:</p> <p>a. Memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji tahun 2025 berjalan optimal, mulai dari pelayanan kesehatan di daerah, pelayanan kesehatan di embarkasi dan debarkasi,</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi, hingga pelayanan kesehatan setelah jemaah kembali ke tanah air, dan</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI meminta penambahan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) khususnya untuk pelaksanaan haji tahun 2026.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada Rapat Kerja hari ini untuk disampaikan paling lambat 8 Mei 2025.</p>	
11.	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN	<p>Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas evaluasi strategi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i> dan penguatan program keluarga berencana: <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian dan evaluasi program penurunan <i>stunting</i>, termasuk efektivitas Gerakan Genting di Triwulan II tahun 2025 b. Peninjauan kebijakan penempatan dan kesejahteraan tenaga PKB/PLKB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN untuk melakukan penyusunan ulang strategi dan penguatan kualitas intervensi percepatan penurunan <i>stunting</i>, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkaji Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN; b. Memprioritaskan intervensi pada kelompok sasaran yang berisiko dan memiliki potensi terdampak; c. Mengoptimalkan pemanfaatan data surveilans dan Keluarga Risiko <i>Stunting</i> (KRS) sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan; d. Menjamin integrasi program percepatan penurunan <i>stunting</i> (PPS) ke dalam RPJMD, RKPD, dan APBD dengan pendekatan berbasis bukti dan partisipatif; dan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>2. Membahas strategi pengendalian kuantitas penduduk dan pencegahan pernikahan usia muda.</p>	<p>e. Memperkuat kelembagaan dan fungsi koordinasi Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) dan Tim Pengendali GENTING di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemendukbangga/BKKBN untuk mendukung penguatan Program Bangga Kencana dan Generasi Berencana (GenRe) sebagai pilar utama pembangunan keluarga dan pengendalian kuantitas penduduk, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian angka kelahiran untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan optimalisasi bonus demografi; b. Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis pendekatan siklus hidup. <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Kemendukbangga/BKKBN untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan sosial ketenagakerjaan, kapasitas, dan distribusi yang proporsional bagi tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) agar pelaksanaan program dapat menjangkau wilayah binaan secara merata dan memperkuat kualitas layanan di lapangan.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kemendukbangga/BKKBN untuk menjamin keberlanjutan program melalui penguatan ekosistem kolaboratif dan layanan KB yang inklusif, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan harmonisasi kebijakan sektoral yang berpihak pada pembangunan keluarga dan kependudukan berkelanjutan; b. Menguatkan peran serta masyarakat, mitra kerja, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program (pentahelix); dan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap alat kontrasepsi yang berkualitas, aman, dan nyaman, khususnya dalam situasi efisiensi fiskal, guna melindungi hak reproduksi dan memastikan pelayanan KB yang adil dan merata.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI meminta Kemendukbangga/BKKBN untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat kerja hari ini paling lambat tanggal 8 Mei 2025.</p>	
12.	<p>Rapat Kerja dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Kesehatan RI 2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI <p>Rapat Dengar Pendapat Umum dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) 2. Majelis Disiplin Profesi (MDP) 3. Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) 4. Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) 5. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 6. Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) 7. Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) 	<p>Rapat kerja dan Rapat dengar pendapat dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025, pukul 13.30 dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas permasalahan pelanggaran kode etik dan disiplin kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Membahas penguatan sistem pengaduan dan perlindungan korban di sektor kesehatan dan Pendidikan 3. Membahas transformasi kebijakan penguatan profesionalisme tenaga medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi peran Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam memproses pengaduan, melakukan verifikasi, serta menetapkan sanksi, termasuk rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). b. Integrasi sistem pelaporan pelanggaran ke dalam <i>platform</i> digital seperti SATUSEHAT SDMK dan pembentukan <i>platform</i> pelaporan nasional yang independen. c. Jaminan perlindungan identitas pelapor, percepatan proses tindak lanjut aduan, serta penguatan standar etik sebagai indikator akreditasi. d. Penegasan peran rumah sakit dalam sistem etik, termasuk pembentukan Komite Etik, mekanisme <i>whistleblowing</i>, dan sistem pemantauan dini. e. Penetapan protokol nasional penanganan pelanggaran etik serta penerapan kebijakan <i>zero</i> 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>tolerance</i> terhadap kekerasan dalam pendidikan profesi.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk memperkuat perlindungan dan tata kelola pendidikan peserta PPDS dan mahasiswa profesi kesehatan lainnya, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan kebijakan anti-perundungan dan pelaksanaan Instruksi Menkes Nomor 1512 Tahun 2023 serta SE Dirjen Yankes di seluruh RS Pendidikan. b. Penyediaan dukungan psikologis dan perlindungan hukum bagi korban, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku kekerasan atau intimidasi. c. Memastikan peserta didik terjamin remunerasi, perlindungan hukum, dan kepastian waktu kerja. d. Pembentukan Komisi Nasional Pengawas PPDS yang melibatkan lintas lembaga, termasuk konsil dan kolegium, untuk memastikan objektivitas pengawasan dan bebas dari konflik kepentingan. e. Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui pembentukan Satgas Bersama antara Perguruan Tinggi dan RS Pendidikan, serta interoperabilitas sistem pelaporan antara Kemendiktisaintek RI dan Kemenkes RI. f. Pemeriksaan tes kejiwaan secara periodik dan penyediaan layanan kesehatan jiwa terintegrasi bagi peserta didik. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk memperkuat fungsi Komite Bersama sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi kebijakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Organisasi Profesi untuk mempercepat transformasi penguatan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan dan pelaksanaan standar profesi, standar kurikulum pelatihan, serta pengembangan kompetensi teknis secara terintegrasi. b. Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) secara digital melalui Plataran Sehat, yang terintegrasi dengan sistem perizinan berbasis SKP. c. Perluasan kuota program <i>fellowship</i> nasional dan internasional untuk layanan prioritas, serta pelatihan teknis untuk tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan pendukung. d. Integrasi nilai-nilai etik, empati, dan tanggung jawab dalam kurikulum pendidikan sejak tahap sarjana hingga profesi, serta peningkatan kapasitas dosen klinik dan pembukaan program studi berbasis kebutuhan wilayah. <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk mereformasi tata kelola pendidikan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>klinik melalui penguatan peran koordinatif dan pengawasan lintas lembaga, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Unit Fungsional Pendidikan (UFP) di seluruh rumah sakit pendidikan sebagai bagian dari persyaratan akreditasi. b. Penetapan Konsil Kesehatan Indonesia dan Kolegium Kesehatan Indonesia sebagai anggota tetap UFP agar dapat terlibat sejak awal proses pendidikan, termasuk pengawasan etik dan disiplin profesi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi kebijakan dan mekanisme pembinaan profesi di UFP dengan kebijakan nasional terkait STR dan SIP yang berbasis pelaporan etik. 	
13.	Menteri Ketenagakerjaan RI	<p>Rapat kerja dilaksanakan pada hari Senin, 5 Mei 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas kesiapan menyelenggarakan program Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di 18 Provinsi serta target capaian yang akan dihasilkan. 2. Membahas implementasi skema <i>school to work transition</i> bekerja sama dengan K/L untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan akselerasi program Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro di 18 (Delapan Belas) provinsi dengan dukungan kesiapan perusahaan dalam perencanaan strategis, alokasi sumber daya, koordinasi lintas sektor di setiap provinsi untuk menetapkan tim pelaksana, mengidentifikasi kebutuhan lokal, serta menyusun indikator kinerja utama yang realistis dan terukur tersistem dalam aplikasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP). 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi skema transisi "<i>School to Work</i>" (integrasi pelatihan dan pemagangan) secara terstruktur dan terintegrasi lintas K/L, lembaga pendidikan formal dan industri untuk menekan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>3. Membahas evaluasi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sektor industri padat karya pemerintah atau swasta.</p> <p>4. Membahas Program dan Anggaran Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) terkait Pengembangan BLK Kemaritiman dan Labor <i>Market Information and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility Project</i> (LISTRAF) Tahun 2025.</p>	<p>angka pengangguran muda melalui pelatihan, magang, dan inkubasi kerja;</p> <p>b. Evaluasi menyeluruh terhadap lonjakan PHK di sektor padat karya, termasuk identifikasi penyebab, pelatihan ulang (<i>reskilling</i>), mitigasi kebijakan, penguatan pengawasan ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, meminimalkan dampak negatif PHK dan mendorong terciptanya pasar kerja yang lebih adaptif dan berkeadilan.</p> <p>c. Penguatan pengawasan dan efektivitas penggunaan dana Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), khususnya untuk pengembangan BLK Kemaritiman dan proyek LISTRAF (<i>Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility</i>) tahun 2025, agar benar-benar mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja nasional dan global.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI menyetujui usulan tambahan penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan rincian:</p> <p>a. Proyek LISTRAF (<i>Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour Market Flexibility</i>) sebesar Rp117.393.760.000,00 (Seratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Pengembangan BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Banyuwangi sebesar Rp17.643.921.000,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).</p> <p>4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini paling lambat tanggal 08 Mei 2025.</p>	
14.	Kepala Badan Gizi Nasional	<p>Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas evaluasi capaian implementasi Program Makan Bergizi Gratis hingga triwulan II tahun 2025. 2. Membahas tantangan koordinasi Badan Gizi Nasional dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan, sehingga ada akselerasi realisasi anggaran tahun 2025. 2. Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas seluruh kasus kejadian yang terkait dengan program-program intervensi gizi, termasuk kejadian keracunan makanan dan kekurangan gizi akut, serta memastikan adanya koordinasi dengan pemerintah daerah, audit berkala, sistem pelaporan dan respon cepat yang transparan dan akuntabel. 3. Komisi IX DPR RI mendesak BGN untuk meningkatkan tata kelola investasi di sektor gizi, dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan program, serta memastikan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. 4. Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk mengkaji alternatif model penyelenggaraan penyediaan MBG, termasuk skema pelibatan sekolah, Usaha Mikro, Kecil, dan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Menengah (UMKM) pangan lokal dengan sistem administrasi yang lebih mudah, melalui mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, serta penggunaan <i>platform</i> digital untuk transparansi distribusi dan pelaporan, guna memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan ketepatan sasaran program.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak BGN memperkuat tata kelola komunikasi publik program MBG guna meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, termasuk menyediakan kanal pengaduan dengan langkah tindak lanjut yang jelas dan transparan.</p> <p>6. Komisi IX DPR RI mendesak BGN untuk segera membangun dan mengimplementasikan sistem surveilans yang lebih efektif dengan tujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mendeteksi dan melacak setiap kejadian keracunan makanan secara real-time, sehingga BGN dapat segera mengetahui, menangani setiap insiden dengan cepat dan melakukan evaluasi sesuai standar penanganan medis; b. Mengintegrasikan sistem surveilans ini dengan pemeriksaan rutin serta pengawasan ketat di setiap tahap program MBG, mulai dari pengadaan hingga distribusi makanan, guna memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan; c. Mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, untuk memastikan respons yang cepat dalam menangani kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>7. Komisi IX DPR RI mendesak BGN untuk berkoordinasi dengan Badan POM RI sesuai dengan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan untuk memastikan bahwa setiap mitra yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, dengan mengutamakan pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, proses pengolahan, dan distribusi makanan.</p> <p>8. Komisi IX DPR RI meminta BGN untuk menyampaikan laporan tindak lanjut atas kesimpulan Rapat hari ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG. Komisi IX DPR RI juga meminta BGN memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini paling lambat tanggal 14 Mei 2025.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>RDP/RDPU Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI pada 6 Mei 2025 pukul 13.00 WIB dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen; 2. Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen; 3. Ketua Umum PP Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI); 4. Prof. Dr. Budiyanto (Guru Besar Universitas Negeri Surabaya). <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi pelaksanaan serta isu-isu strategis dalam Pendidikan Anak Usia Dini 	<p>2. Para narasumber memaparkan evaluasi penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan informal, pendidikan nonformal, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, penerapan Wajib Belajar 13 Tahun, dan pandangan terhadap revisi UU di bidang pendidikan, dengan poin utama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan akses dan tata kelola. Hal ini terlihat dari dominasi PAUD swasta (97%) dibanding negeri (3%), rendahnya proporsi anggaran PAUD baik di tingkat nasional (hanya 0,69% dari total anggaran pendidikan) maupun daerah (bahkan ada kabupaten/kota dengan alokasi 0%), serta masih adanya 21% desa yang belum memiliki satuan PAUD. b. Regulasi perizinan PAUD belum fleksibel dan belum terintegrasi, serta tata kelola kelembagaan yang belum optimal, memperburuk kesulitan akses terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan daerah 3T dan marginal serta ABK. c. Kualitas layanan PAUD masih perlu banyak perbaikan, mulai dari rendahnya kesejahteraan dan kualifikasi tenaga pendidik (hanya sekitar 50% PTK PAUD yang memiliki ijazah S1), minimnya satuan PAUD yang mampu membangun kemandirian dan perilaku prososial anak 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>(PAUD).</p> <p>2) Evaluasi pelaksanaan serta isu-isu strategis dalam Pendidikan Non-Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.</p> <p>3) Masukan terkait pengaturan penerapan wajib belajar pendidikan 13 tahun.</p> <p>4) Masukan dan rekomendasi dalam RUU tentang Sisdiknas.</p>	<p>(hanya 5%), dan hanya 55% satuan PAUD yang terakreditasi minimal B.</p> <p>d. RUU tentang Sisdiknas perlu secara konkret menata pengelolaan PAUD dengan mengatur (1) sistem perizinan tunggal untuk multi-layanan PAUD, (2) memperkuat kualifikasi, perlindungan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, (3) memperluas akses dan pemerataan layanan PAUD di daerah 3T dan marginal serta bagi ABK, (4) menetapkan standar mutu layanan, (5) mendorong optimalisasi peran dan komitmen pemerintah daerah dalam penganggaran dan perizinan, serta (6) meniadakan pembagian PAUD formal dan nonformal.</p> <p>e. Penerapan wajib belajar 13 tahun pada jenjang PAUD menegaskan bahwa setiap anak wajib mengikuti pendidikan PAUD minimal satu tahun tanpa perlu mengubah kurikulum yang sudah berfokus pada pengembangan alami anak (nilai agama, moral, kognitif, fisik, sosial-emosi, bahasa, seni, dan literasi-numerasi awal), dengan indikator keberhasilan yang dapat mengadopsi ECDI 2030 sesuai konteks nasional.</p> <p>f. RUU tentang Sisdiknas perlu mengatur standar mutu pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual agar dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan khusus dan layanan khusus dengan memperhatikan kondisi lokal, peserta didik, serta indikator partisipasi dan ketuntasan.</p> <p>g. RUU tentang Sisdiknas memperkuat indikator mutu terkait tenaga pendidikan, kurikulum, sarana, dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.</p> <p>6. Terhadap pandangan narasumber, Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan:</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Kemendikdasmen RI memberikan kajian Wajib Belajar 13 tahun dan konsekuensi pembiayaan Wajib Belajar 13 tahun yang mencakup: (1) kecukupan anggaran; (2) skema pembiayaan; dan (3) prioritas penggunaan anggaran. b. Pengaturan penerapan Wajib Belajar 13 tahun di dalam RUU Sisdiknas menempatkan PAUD sebagai pendidikan formal yang strategis dan didukung regulasi, anggaran, serta tata kelola yang memadai untuk pemerataan dan peningkatan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia. c. Pendidikan informal, pendidikan nonformal, pendidikan khusus, dan layanan khusus diakui dan diatur secara tegas sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan nasional dalam RUU tentang Sisdiknas, sehingga seluruh jalur pendidikan memperoleh pengakuan, perlindungan, dan dukungan setara dengan pendidikan formal. 	
2.	RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional	Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Sisdiknas ke Jawa Timur tanggal 30 April—2 Mei 2025.	<p>Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek RI untuk menyerap masukan dari perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membahas persoalan persaingan dalam pendaftaran mahasiswa yang semakin timpang dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Terdapat alternatif solusi, seperti merger antar PTS, yang dapat dipertimbangkan untuk menciptakan keseimbangan dalam kompetisi. b. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah agar inventarisasi anggaran 20% pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan untuk perguruan tinggi kedinasan lainnya (PTKL) perlu dilakukan dengan lebih rinci. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan atau inefisiensi dalam alokasi anggaran pendidikan tinggi. Komisi X dapat mengundang Kementerian Keuangan, khususnya 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Direktorat Jenderal Anggaran, untuk membedah postur anggaran PTKL dan sekolah kedinasan secara transparan.</p> <p>c. Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek RI untuk menyerap masukan dari PTS terkait beban pembiayaan akreditasi. Namun, harus dipikirkan solusi untuk menekan biaya tersebut tanpa mengorbankan standar mutu pendidikan yang diperlukan. Akreditasi ini juga harus sejalan dengan konsep <i>link and match</i> dengan kebutuhan industri dan dunia kerja.</p> <p>d. Komisi X DPR RI mendorong Kemdiktisaintek RI untuk menerbitkan regulasi khusus terkait transparansi dan keadilan dalam pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk melakukan evaluasi ulang terhadap skema biaya akreditasi serta mendorong kebijakan insentif bagi PTS yang menjalankan fungsi sosial dan inklusif.</p> <p>e. Komisi X DPR RI bersama Kemdiktisaintek RI perlu mengkaji ulang kebijakan rasio dosen-mahasiswa dan memperkuat sistem pembelajaran daring nasional yang terintegrasi, agar dapat diakses secara merata oleh PTN, PTS, dan PTKL dengan prinsip keadilan.</p> <p>f. Komisi X DPR RI bersama Kemdikbudristek diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model Universitas Terbuka (UT), khususnya dampaknya terhadap kompetisi sehat antar perguruan tinggi, serta implikasinya terhadap akreditasi, rasio dosen, dan penjaminan mutu pendidikan.</p>	
3.		Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Sisdiknas ke Provinsi Riau tanggal 30 April–2 Mei 2025.	<p>Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut:</p> <p>a. Kemdiktisaintek RI meningkatkan dukungan afirmatif dan proporsional kepada wilayah LLDikti XVII melalui: percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi (termasuk gedung LLDikti XVII), penambahan kuota KIP-K</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>secara signifikan, serta penataan regulasi yang menjamin otonomi, pendanaan berkeadilan, dan perlindungan bagi PTS dan pendidikan vokasi, dengan penegasan peran pemerintah daerah dan pusat secara tegas dalam regulasi, serta harmonisasi standar akreditasi yang adaptif terhadap kondisi daerah.</p> <p>b. Seluruh masukan terkait isu krusial RUU tentang Sisdiknas menjadi bahan pertimbangan Panja untuk menyusun kegiatan dengan mengundang para K/L terkait yang memiliki tugas dan fungsi yang berurusan dengan bidang pendidikan guna mendalami setiap isu dan konsep pengaturannya dalam RUU tentang Sisdiknas.</p>	
4.		Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Sisdiknas ke Jawa Tengah tanggal 30 April – 2 Mei 2025.	Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI perlu memperhatikan saran dan masukan dari pemangku kepentingan di LLDikti Wikayah VI dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi lainnya di Semarang sebagaimana pembaruan kurikulum dan sistem akreditasi serta memperhatikan temuan data dari LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI	Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 April 2025 pukul 10.00 WIB.	(Rapat Tertutup).	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI	Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 22 April 2025 pukul 14.00 WIB, dengan agenda: 1) Progres Pelaksanaan Program Kerja dan Dukungan Anggaran Kemendikdasmen RI TA 2025, dan 2) Lain-lain.	(Rapat Tertutup).	
3.	Menteri Kebudayaan	Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 23 April 2025 pukul 10.00 WIB, dengan agenda: 1) Progres Pelaksanaan Program Kerja dan Dukungan Anggaran Kementerian Kebudayaan TA 2025, 2) Lain-lain.	(Rapat Tertutup).	
4.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Raker Komisi X DPR RI tanggal 23 April pukul 13.30 WIB, dengan agenda: 1) Progres Pelaksanaan Program Kerja dan Dukungan Anggaran Kemenpora TA 2025, 2) Lain-lain.	(Rapat Tertutup).	
5.	Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 WIB dengan agenda: 1) Progres Pelaksanaan Program Kerja dan Dukungan Anggaran Kemdiktisaintek TA 2025, 2) Lain-lain.	(Rapat Tertutup).	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Kepala Perpustakaan Nasional RI	<p>RDP Komisi X DPR RI pada tanggal 24 April 2025 pukul 10.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Progres Pelaksanaan Program Kerja dan Dukungan Anggaran Perpustakaan RI TA 2025, dan 2) Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Perpustakaan RI menyampaikan bahwa Pagu Perpustakaan RI TA 2025 sebesar Rp721.684.480.000 (<i>tujuh ratus dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah</i>) mengalami rekonstruksi efisiensi belanja sebesar Rp279.858.332.000 (<i>dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah</i>), sehingga alokasi yang dapat digunakan Perpustakaan RI TA 2025 adalah sebesar Rp441.826.148.000 (<i>empat ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>). 2) Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian realisasi anggaran Perpustakaan RI Per-Triwulan I TA 2025 sebesar Rp97.085.536.877 (<i>sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah</i>) atau sebesar 21,97%, melebihi target realisasi sebesar 15%. 3) Komisi X DPR RI mendukung Perpustakaan RI dalam melakukan percepatan pelaksanaan DAK Fisik untuk 29 daerah sebesar Rp232.477.907.531 (<i>dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah</i>), dan DAK Non-Fisik untuk 207 daerah sebesar Rp150.000.000.000 (<i>seratus lima puluh miliar rupiah</i>), sehingga realisasi anggaran DAK dapat dimaksimalkan. 4) Terkait pelaksanaan program kerja dan penyerapan anggaran Perpustakaan RI TA 2025, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan relaksasi anggaran untuk program-program prioritas, seperti program preservasi dan digitalisasi 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>naskah kuno dan kontemporer, sebagai bagian dari pelestarian warisan intelektual bangsa.</p> <p>b. Mengoordinasikan percepatan realisasi peningkatan tunjangan dan sertifikasi bagi pustakawan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat motivasi kerja, serta mendorong profesionalisme dan kualitas layanan perpustakaan.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas perpustakaan di daerah, melalui penerapan akreditasi, standardisasi, pemutakhiran koleksi, dan penghargaan kepada daerah yang peduli terhadap program literasi.</p> <p>d. Memasukkan buku-buku lokal ke dalam koleksi nasional sebagai upaya memperkaya khazanah literasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta memperkuat identitas budaya di daerah.</p> <p>e. Melakukan <i>rebranding</i> (transformasi citra) perpustakaan melalui berbagai strategi inovatif, seperti melibatkan para wirausahawan, tokoh inspiratif, pekerja kreatif, dll, guna meningkatkan daya tarik generasi muda terhadap dunia literasi dan budaya baca.</p>	
7.	Kepala Badan Pusat Statistik	RDP Komisi X DPR RI pada 28 April 2025 pukul 10.00 WIB dengan agenda: 1) Progres Pelaksanaan Program Kerja dan Dukungan Anggaran BPS TA 2025, dan 2) Lain-lain.	(Rapat tertutup).	
8.	DPRD Kabupaten Pematang	Audiensi Pimpinan Komisi X DPR RI dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 pukul 12.00 WIB dengan	(Rapat Tertutup).	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		DPRD Kabupaten Pematang.		
9.	Kuanta Indonesia, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dan UNICEF Indonesia	<p>RDPD Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kontribusi organisasi masyarakat dan perguruan tinggi dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah. 2) Program dan strategi untuk meningkatkan minat anak-anak di daerah terpencil agar tetap bersekolah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Para narasumber memaparkan pandangan dan rekomendasi terhadap kondisi Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI, diantaranya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Keberhasilan pendidikan di daerah 3T tidak hanya membutuhkan program afirmasi berupa PIP dan KIP Kuliah dan beasiswa lainnya, tetapi sangat bergantung pada peran orangtua dan nilai-nilai budaya setempat dan berbasis kearifan lokal, sehingga perlu penguatan program pendidikan keluarga, misalnya dengan mengaktifkan kembali peran Direktorat Pembinaan Keluarga di Kemendikdasmen RI. b. Pendidikan di daerah 3T sangat memerlukan dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang representatif dan mudah diakses sesuai dengan kondisi wilayahnya. b. Perlu adanya integrasi kewenangan pelaksanaan pendidikan dalam pengelolaan dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI) supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan dan dapat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. c. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu menghindari dikotomi layanan pendidikan dalam penanganan anak tidak sekolah, namun perlu membangun kerja sama terkait integrasi kebijakan, sinergi program, dan pendekatan fleksibel. d. Komite Sekolah serta Dewan Pendidikan perlu ditingkatkan peran dan fungsinya di dalam revisi UU tentang Sisdiknas. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e. Penguatan untuk penanganan pelaksanaan pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal menjadi masukan penting yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan revisi UU tentang Sisdiknas.</p> <p>2) Terhadap masukan dan penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengelolaan sekolah di daerah 3T tidak dapat disamakan dengan sekolah normatif, sehingga pemerintah perlu membentuk kebijakan khusus yang kontekstual, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan lokal agar layanan pendidikan tetap relevan dan berkualitas.</p> <p>b. Penanganan dan pengelolaan sekolah di daerah 3T dan daerah marginal, membutuhkan penguatan kapasitas dan ketahanan guru sebagai pendidik pejuang, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak dan berkelanjutan agar pendidikan dapat berjalan secara efektif, bermutu, dan berkeadilan.</p> <p>c. Pemenuhan kebutuhan guru di daerah 3T dan daerah marginal diutamakan yang berasal dari daerah tersebut dan mendapatkan fasilitas pendidikan calon guru dari Pemerintah</p> <p>d. Pengelolaan pendidikan perlu mengatasi problem kelembagaan, terutama kebijakan yang bias politik, karena selama ini tumpang tindih kewenangan pelaksana pendidikan menghambat efektivitas dan konsistensi kebijakan pendidikan di lapangan.</p> <p>e. Pemenuhan anggaran pendidikan untuk daerah 3T dan daerah marginal harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 sebesar 20% dari APBN yang proporsional dan berkeadilan.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Jadwal Acara Rapat Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025.	Tertutup.	
2.	Ketua DK OJK	Rapat kerja membahas Rancangan POJK tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan tanggal 28 April 2025.	Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai substansi Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (RPOJK UMKM). 2. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Kemudahan Akses Pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur dalam POJK diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, mendorong	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kemudahan akses penyaluran kredit/pembiayaan UMKM, serta tata kelola dan manajemen risiko yang memadai dalam penyaluran pembiayaan UMKM.</p> <p>3. Otoritas Jasa Keuangan dalam kebijakan Kemudahan Akses Pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur dalam POJK, sebagaimana RPOJK terlampir, mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Ketentuan Umum; II. Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Rencana Pembiayaan UMKM; III. Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM; IV. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Bank dan LKNB; V. Kemitraan dalam Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan oleh Bank dan LKNB; VI. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Ekosistem Digital Pembiayaan UMKM; VII. Hapus Buku dan Hapus Tagih Pembiayaan UMKM; VIII. Literasi Keuangan dan Pelindungan Konsumen kepada Pelaku UMKM; IX. Insentif bagi Bank dan LKNB; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup. <p>4. Otoritas Jasa Keuangan memperkuat substansi RPOJK yang mengatur hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana bisnis LJK dalam menjalankan kemudahan akses pembiayaan UMKM disertai dengan kewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan; (memperkuat Pasal 8) b. POJK memitigasi risiko pembiayaan UMKM; (memperkuat Pasal 10) 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Penyederhanaan pembiayaan dan penilaian kelayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, dilengkapi dengan indikator/kriteria antara lain cepat, murah, tepat, mudah, dan inklusif.</p> <p>5. OJK menselaraskan POJK lainnya yang terkait untuk dapat melaksanakan POJK ini secara efektif.</p> <p>6. OJK memperkuat fungsi TPAKD dalam rangka mendorong kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM di daerah.</p> <p>7. Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dalam rangka sosialisasi dengan Kementerian/Lembaga dan <i>stakeholders</i> lainnya sebelum diberlakukannya POJK tentang Akses Pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>8. Dengan Rapat Konsultasi ini, maka OJK bisa melanjutkan proses penerbitan dan penetapan POJK tentang Akses Pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
3.	Ketua DK OJK	Rapat Kerja dengan agenda Tindak Lanjut Putusan Pengadilan di Sektor Perbankan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai substansi Tindak Lanjut Putusan Pengadilan di Sektor Perbankan. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi tingkat keberhasilan penanganan perkara yang tinggi oleh OJK dan mendorong OJK untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan perkara secara efektif dalam menjalankan fungsi tugas pengawasan. 3. Komisi XI DPR RI mendorong OJK untuk menindaklanjuti perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengadilan, serta menyampaikan laporan tindak lanjut secara berkala kepada Komisi XI DPR RI.</p> <p>4. Komisi XI DPR RI mendorong OJK dalam memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat penyelesaian kasus hukum, dan menegakkan prinsip <i>zero tolerance</i> terhadap fraud di industri perbankan dan mendorong perbankan untuk menerapkan sistem anti-fraud yang lebih efektif guna mengurangi risiko tindak pidana. Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi proses ini untuk memastikan pengawasan OJK berjalan efektif, adil dan mampu mencegah kasus serupa dimasa depan.</p> <p>5. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
4.	Kunjungan Kerja Spesifik	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 30 April s.d. 2 Mei 2025 dengan tema Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.	<p>Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 30 April s.d 1 Mei 2025. Kunker Spesifik dipimpin oleh Dr. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., Ketua Komisi XI DPR RI, dan diikuti oleh beberapa anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.</p> <p>Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI). Hadir dalam kesempatan tersebut dari Bank Indonesia: Juda Agung (Deputi Gubernur), Solikin M. Juhro (Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial), Ramdan Denny Prakoso (Kepala Departemen Komunikasi), Bayu Martanto (Kepala Grup Departemen Regional), Agus Sisty Widjajati (Kepala Perwakilan BI Provinsi Nusa</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Tenggara Timur). Dalam sambutannya Dr. Misbakhun menyampaikan bahwa pertemuan-pertemuan dengan mitra kerja Komisi XI yang dilaksanakan di daerah adalah untuk menghidupkan perekonomian daerah. Untuk itu Komisi XI akan semakin menghidupkan perekonomian daerah dengan melaksanakan banyak kegiatan di daerah.</p> <p>Julie S. Laiskodat, anggota Komisi XI dari Partai Nasdem, memberikan apresiasi dan mendorong terus terlaksananya kerja sama Pemerintah Provinsi NTT dan BI Perwakilan NTT, terkait promosi produk-produk lokal yang berkualitas tinggi. Sementara Melchias Markus Mekeng, anggota Komisi XI dari Partai Golkar, menjelaskan bahwa Provinsi NTT tidak akan menikmati bonus demografi, karena mereka yang memiliki potensi, meneruskan pendidikan dan mencari penghidupan ke luar daerah. NTT adalah provinsi yang hanya mengandalkan kekayaan alam dan budaya. Hal ini merupakan fakta yang tidak perlu disesalkan. Karena itu rumusan kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan kondisi itu. Termasuk juga dukungan BI Perwakilan NTT harus mengacu pada kondisi tersebut. Mekeng mengusulkan perlunya BI Perwakilan NTT membuat percontohan satu komunitas UMKM yang diubah mindset-nya sehingga bisa diikuti oleh UMKM yang lain. Sejalan dengan pernyataan para koleganya, Andreas Eddy Susetyo, anggota Komisi XI dari Partai PDI Perjuangan menekankan pentingnya intervensi kebijakan, termasuk kebijakan moneter yang menjadi kewenangan BI, untuk mendukung perekonomian daerah.</p>	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 30 April s.d. 2 Mei 2025 dengan tema Kemudahan	Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024 - 2025 ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 April – 02 Mei 2025. Kunspek dipimpin oleh Bapak H. Fauzi Amro, M.Si. selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, dan beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi. Berlokasi di ITDC Mandalika Tourisme Complex, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tim Kunspek melakukan pertemuan dengan Bapak Agusman (Anggota DK OJK), Bapak Rudy Sulistyono (Kepala OJK Provinsi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Akses Pembiayaan Kredit UMKM.	<p>NTB), Ibu Kristianti Puji Rahayu (Kepala OJK Provinsi Bali), Bapak Fredly Nasution (Direktur Hubungan Kelembagaan OJK) serta jajaran OJK lainnya. Turut hadir juga beberapa perwakilan dari Himbara, Bank NTB dan Lembaga Keuangan Non Bank di Nusa Tenggara Barat.</p> <p>Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR RI Bapak H. Fauzi Amro menyoroti tentang kendala para pelaku UMKM dalam mendapatkan kemudahan akses pembiayaan. Beliau mengatakan bahwa para pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga pembiayaan tidaklah mudah sehingga diperlukan kehadiran dan perhatian khusus dari OJK agar sesegera mungkin dibenahi sehingga mereka bisa naik kelas khususnya para pelaku UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Untuk menjawab semua permasalahan itu, sesuai kesimpulan rapat Kerja antara Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner OJK pada hari Senin, 28 April 2025 mengenai Rancangan POJK tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM yang dimana telah disepakati beberapa poin diantaranya bahwa kebijakan OJK dalam kemudahan akses pembiayaan UMKM yang diatur dalam POJK nantinya diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, mendorong kemudahan akses penyaluran kredit/pembiayaan UMKM, serta tata kelola dan manajemen risiko yang memadai dalam penyaluran pembiayaan umkm dengan penyederhanaan pembiayaan dan penilaian kelayakan, menyelaraskan aturan-aturan terkait agar POJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM ke depannya bisa berjalan efektif, memperkuat fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai upaya dalam mendorong kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM di daerah dan meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> lainnya.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Sementara itu, Bapak Agusman selaku Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dan tim dalam penjelasannya mengatakan bahwa dalam rangka mendorong kemudahan pembiayaan bagi para pelaku UMKM, salah satu yang telah dilakukan OJK adalah bersinergi dengan berbagai pihak termasuk melalui wadah TPAKD dalam meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM, yang dapat mendukung peningkatan akses permodalan UMKM kepada industri keuangan formal. Masih banyak lagi program dan terobosan lainnya dalam mendorong peningkatan UMKM secara nasional yang telah dijalankan khususnya di Nusa Tenggara Barat dan di akhir pemaparannya Bapak Agusman menegaskan bahwa segala masukan yang mereka terima akan menjadi bahan dalam finalisasi POJK terkait kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM sehingga harapan kita bersama agar UMKM bisa naik kelas bisa terwujud.</p> <p>Diakhir pertemuan, tim Kunjungan Kerja Spesifik kembali menekankan agar hadirnya POJK terkait kemudahan pembiayaan UMKM nantinya bisa di sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi solusi atas segala kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM kita selama ini. Tim Kunjungan Kerja Spesifik juga mengingatkan OJK dan pelaku Industri Jasa Keuangan selaku mitra kerja Komisi XI DPR RI untuk selalu menjaga dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga tetap stabil dan tumbuh positif di tengah berbagai macam dinamika dan tantangan global sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UU P2SK.</p>	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Denpasar, Provinsi Bali Tanggal 30 April s.d. 2 Mei 2025 dengan tema Perkembangan Proses	Jumat, tanggal 2 Mei 2025, Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik (Kunspek) ke Provinsi Bali, Kota Denpasar, bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam kunjungan ini Komisi XI DPR RI ingin mendengar secara langsung terkait permasalahan, tantangan, strategi, termasuk proses penutupan Bank Perekonomian Rakyat, khususnya di Provinsi Bali dan sekitarnya.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Penutupan Bank Perekonomian Rakyat.</p>	<p>Kunjungan Kerja Spesifik ini dipimpin oleh Bapak Mohamad Hekal, MBA., sebagai Ketua Tim Kunspek dan dihadiri oleh beberapa anggota Komisi XI DPR RI. Dalam Kunjungan Kerja tersebut juga turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan Dan Resolusi Bank : Bapak Didik Madiyono, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan Dan Statistik : Bapak Dwityapoetra S Besar, PLT. Kepala Kantor Persiapan Prp Dan Hubungan Lembaga: Bapak Herman Saheruddin, Direktur Group Litigasi Lps: Bapak Sigit Sumarlan, Direktur Group Riset: Bapak Seto Wardono, Direktur Group Penanganan Klaim Bank: Bapak Sofyan Baehaqie, Kepala Kantor Perwakilan II Surabaya: Bapak Bambang Samsul Hidayat.</p> <p>Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, BPR menjadi salah satu pilar penting yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, ketika sebuah BPR mengalami kesulitan dan harus ditutup, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik bank, tetapi juga oleh nasabah, karyawan, dan masyarakat sekitar. Dalam situasi seperti ini, LPS hadir sebagai penjamin simpanan nasabah, memberikan jaminan bahwa simpanan mereka akan dilindungi hingga batas tertentu. Ini adalah langkah penting untuk mencegah kepanikan di kalangan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.</p> <p>Oleh karena pada kesempatan kunjungan hari ini, kami dari Komisi XI DPR RI ingin mendengar secara langsung terkait permasalahan, tantangan, strategi, termasuk proses penutupan Bank Perekonomian Rakyat, khususnya di Bali dan sekitarnya.</p>	
7.	Gubernur Bank Indonesia	<p>Rapat Kerja membahas Kinerja Bank Indonesia Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025.</p>	<p>Tertutup.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	Gubernur Bank Indonesia	Rapat Kerja membahas Partisipasi Bank Indonesia dalam Nexus dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025.	<p>Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Gubernur Bank Indonesia mengenai partisipasi Bank Indonesia dalam Nexus. 2. Komisi XI DPR RI memberi dukungan pada partisipasi Bank Indonesia dalam inisiatif Nexus sebagai bagian dari kerja sama internasional dalam pelaksanaan kebijakan sistem pembayaran yang memerlukan anggaran kebijakan. 3. Peran serta Bank Indonesia dalam Nexus sebagai wujud kerja sama internasional dalam sistem pembayaran sesuai komitmen G20 ASEAN <i>Regional Payments Connectivity (RPC)</i>, dan <i>Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030</i> harus dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian serta sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap menjaga kedaulatan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Partisipasi Indonesia dalam Proyek Nexus harus dapat mengoptimalkan peran Bank Indonesia yang dominan pada <i>policy committee, oversight committee</i>, serta di <i>Nexus Scheme Organization (NSO)</i>. 5. Bank Indonesia, dalam melaksanakan partisipasi Indonesia dalam Nexus melaksanakan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Nexus memberi alternatif pengiriman dana antar negara secara cepat, mudah dan dalam harga yang terjangkau; b. Kerja sama sistem pembayaran <i>Quick Response Code (QR)</i> dan <i>Retail Fast Payments</i> antara negara diintegrasikan dengan inisiatif <i>Local Currency Transaction (LCT)</i> untuk penggunaan mata uang lokal sebagai penyelesaian transaksi; c. Memberikan nilai tambah bagi perekonomian secara luas terutama bagi UMKM; d. Skema Nexus mendukung integrasi keuangan ekonomi digital serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none">e. Partisipasi Indonesia dalam Nexus guna mendukung kepentingan Indonesia secara Internasional; danf. Menerapkan prinsip kehati-hatian, meminimalisir risiko, dan memiliki mitigasi risiko. <p>6. Keikutsertaan Bank Indonesia sebagai anggota dalam <i>Nexus Scheme Organization</i> (NSO) yang bertanggung jawab dalam mengelola Nexus, secara berkala akan melaporkan kepada Komisi XI DPR RI.</p> <p>7. Gubernur Bank Indonesia akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU EBET, RUU Ketenagalistrikan dan RUU Migas	Rapat Intern dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025, pukul 11.00 WIB.	1. <i>Brainstorming Draft</i> RUU EBET (RUU <i>carry over</i>) 2. Penjelasan penyusunan <i>Draft</i> RUU Ketenagalistrikan 3. Penjelasan penyusunan <i>Draft</i> RUU MIGAS	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Menyusun Jadwal Acara Rapat Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025; 2. Lain-lain.	
2.	Panitia Khusus DPRD Provinsi Jambi	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat audiensi dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, pukul 10.00 WIB.	Konsultasi terkait <i>participating Interest</i> (PI) 10% Migas di wilayah Provinsi Jambi.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Dirjen Ketenagalistrikan ESDM RI dan Dirut PT PLN (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Penjelasan kesesuaian RUKN dan RUPTL; 2. Lain-lain.	
4.	Kunjungan Kerja Spesifik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 April 2025.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke: 1. Provinsi NTT; 2. Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Dirjen Migas KESDM RI, Kepala SKK Migas	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Migas dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025, pukul 11.00 WIB.	1. Mekanisme dan ketentuan pengadaan di sektor hulu migas. 2. Lain-lain.	
6.	Dirjen Migas KESDM RI, Kepala SKK Migas, Dirut PT PLN (Persero) dan Dirut PT PGN Tbk	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Ketersediaan pasokan gas untuk Pembangkit dan Industri Pupuk. 2. Rencana Pembangunan infrastruktur LNG untuk penyedia tenaga listrik. 3. Peningkatan <i>lifting</i> migas melalui penataan <i>drilling</i> masyarakat. 4. Lain-lain.	
7.	Kepala BAPETEN, Dirjen EBTKE KESDM RI, sekejen DEN dan Kepala BRIN dan RDPU dengan Dirut PT Industri Nuklir Indonesia	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 30 April	1. Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia. 2. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	(Persero) (INUKI) dan Ketua Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI)	2025, pukul 10.00 WIB.		
8.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Borneo Alumina Indonesia, Dirut PT Bintang Alumina Indonesia, Dirut PT WHW Alumina refinery dan RDPU dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemurnian Bauksit Alumina Indonesia (AP3BAI)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, Pukul 14.00 WIB.	1. Kapasitas produksi dan kapasitas <i>smelter</i> ; 2. Dampak kebijakan pelarangan ekspor bijih; 3. Harga patokan mineral; 4. Lain-lain.	
9.	<i>Institute for Essential Services Reform (IESR)</i>	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, pukul 11.00 WIB.	Masukan dari IESR terkait Potensi Energi Terbarukan di Indonesia.	
10.	Dirut PT Bukit Asam	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.	1. Perkembangan hilirsasi batubara; 2. Lain-lain.	
11.	Dirjen Minerba Kementrian ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 6 Mei	1. Strategi dalam menjaga stabilitas harga komoditas mineral dan Batubara di dalam negeri; 2. Penjelasan terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Kenaikan Royalti;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2025, pukul 13.00 WIB.	3. Perkembangan hilirisasi batubara; 4. Lain-lain.	
12.	Dirjen Minerba KESDM RI dan RDPU dengan Dirut PT Mahakam Sumber Jaya	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Praktik pertambangan berkelanjutan; 2. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	<p>KunKer fungsi Legislasi ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Yogyakarta, DIY 2. Semarang, Jawa Tengah 3. Surabaya, Jawa Timur <p>Dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 April 2025.</p>	<p>Mencari dan mendapatkan masukan dari para <i>stakeholder</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di ketiga daerah Kunker; 2. Perwakilan Pemerintah Daerah; 3. Akademisi; 4. Lembaga/Organisasi non Pemerintah Pemerhati Perlindungan terhadap Saksi dan Korban; 5. Pegiat HAM. 	
2.		<p>RDPU dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) 2. HUMA (Perkumpulan Pembaharuan Hukum Masyarakat) dan 3. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) <p>Dilaksanakan pada 30 April 2025.</p>	<p>Mendapatkan masukan dari narasumber atas rencana Penyusunan RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p>	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kepala LPSK	RDP dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025, dengan agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024; 2. Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada RDP ini Komisi XIII DPR RI ingin mendalami program kerja tahun 2025 pasca rekonstruksi anggaran. Sekaligus melihat capaian kinerja tahun 2024. 2. Komisi XIII DPR RI mendukung percepatan dibentuknya kantor perwakilan/penghubung LPSK di daerah, terutama di daerah dengan tingkat pelaporan tertinggi yang memanfaatkan digitalisasi dan mendorong LPSK untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah agar pembentukan kantor perwakilan/penghubung LPSK tersebut dapat segera terwujud. 3. Komisi XIII DPR RI mendorong LPSK untuk menginisiasi program-program strategis yang bertujuan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman publik mengenai tugas, fungsi, dan layanan LPSK, sehingga keberadaan dan peran LPSK dikenal luas dan dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat serta Komisi XIII DPR RI mendukung penuh terhadap program prioritas Sahabat Saksi dan Korban berbasis komunitas. 4. Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan kewenangan LPSK melalui penyusunan RUU Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat memasukan pernyataan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa menunggu adanya permohonan dan Aparat Penegak Hukum wajib memberikan informasi kepada LPSK. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Eselon I Kementerian HAM	RDP dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025, dengan agenda: 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024; 2. Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025.	1. Pada RDP ini Komisi XIII DPR RI ingin mendalami program kerja tahun 2025 pasca rekonstruksi anggaran. Sekaligus melihat capaian kinerja tahun 2024. 2. Komisi XIII DPR RI menunda Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian HAM sampai Kementerian HAM menyerahkan Rincian Anggaran Tahun 2025 dan Rincian Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang diajukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI, dan diserahkan kepada Komisi XIII DPR RI paling lambat sehari sebelum rapat selanjutnya yang akan diagendakan kemudian.	
3.	ESELON I Kementerian IMIPAS	RDP dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025, dengan agenda: 1. Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran 2024; 2. Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025.	1. Pada RDP ini Komisi XIII DPR RI ingin mendalami program kerja tahun 2025 pasca rekonstruksi anggaran. Sekaligus melihat capaian kinerja tahun 2024. 2. Komisi XIII DPR RI mendorong kepada Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan untuk meningkatkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memenuhi kebutuhan kekurangan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 3. Komisi XIII DPR RI mendukung peningkatan status kantor imigrasi yang ada di beberapa daerah yang membutuhkan (seperti di Sulawesi Utara dan Aceh) guna meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi Masyarakat. 4. Komisi XIII DPR RI mendorong kepada Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan untuk segera menyelesaikan pembagian aset dengan Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, dan segera melakukan kordinasi dengan Kementerian Terkait dan Pemerintah	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Daerah bagi penyediaan lahan dan gedung kantor wilayah Ditjend Imigrasi dan Pemasarakatan di daerah,</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI mendorong kepada Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan untuk segera melakukan kordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam penyediaan tenaga medis dan peralatan kesehatan untuk pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan.</p> <p>6. Komisi XIII DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk segera menetapkan status Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) sebagai Lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara;</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah.</p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025.</p>	<p>1. Membahas Program Kegiatan/Jadwal Kegiatan Komisi XIII DPR RI MS III TS 2024-2025;</p> <p>2. Menetapkan Daerah Kunker Reses MP III TS 2024-2025.</p> <p>Daerah Kunker Reses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumatera Selatan 2. Kalimantan Selatan 3. Papua 	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penasihat Hukum eks Karyawan Sirkus OCI 2. Komnas HAM 	RDPU/Audiensi dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.	Menerima pengaduan dari eks Pemain Sirkus “ <i>Oriental Circus</i> Indonesia (Taman Safari Indonesia)” terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemilik OCI	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>3. Komnas Perempuan 4. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, KemenHAM.</p>		<p>terhadap pengadu, sejak tahun 1997 yang belum ada tindak lanjut penyelesaian rekomendasi Komnas HAM sampai dengan sekarang.</p>	
3.	Komisi Nasional Disabilitas	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025.	<p>Menerima informasi / pengenalan Lembaga Komnas Disabilitas terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan Fungsi Komnas Disabilitas; 2. Program Kerja; 3. Capaian Kinerja; 4. Kendala dan Hambatan pelaksanaan Tusi Komnas Disabilitas, termasuk efisiensi anggaran. 5. Mengharapkan ada bantuan dari Komisi XIII untuk membuka blokir anggaran dalam rangka efisiensi, karena anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk melaksanakan program kerja di Tahun 2025. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Baleg dilaksanakan pada Kamis, 17 April 2025 pukul 14.15 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislati Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024—2025 akan diisi dengan kegiatan untuk penyusunan RUU yang telah disiapkan Badan Legislati. Adapun RUU yang akan disusun oleh Baleg yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Statistik • RUU tentang Pertekstilan • RUU tentang Komoditas Strategis • RUU tentang Pilkada • RUU tentang Pemilu 2. Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislati Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025 yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Rapat Dengar pendapat Umum dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang direncanakan dijadwalkan pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024—2025. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	RUU tentang Statistik	RDPU dilaksanakan pada Senin, 21 April 2025 pukul 13.25 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan PT Shopee, Perwakilan PT Tokopedia, Perwakilan PT Telkomsel, Perwakilan PT Indosat, dan Perwakilan PT XLsmart dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RUU tentang Statistik harus sejalan dan harmonis dengan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, hal ini untuk memastikan pemrosesan data yang bertanggung jawab sekaligus melindungi hak subjek data pribadi. 2. Selain Narasumber yang diundang hari ini, Baleg juga akan mengundang pihak-pihak terkait di bidang keuangan seperti OJK, BI, bank nasional, dan bank swasta nasional untuk mendapatkan masukan/pandangannya terhadap RUU tentang Statistik. 3. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg. 4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik. 	
3.	RUU tentang Statistik	RDP dilaksanakan pada Selasa, 22 April 2025 pukul 13.47 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPS dan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPS perlu memperkuat struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memperluas peran sesuai amanat RPJPN. 2. Dukcapil berperan penting dalam verifikasi penerima bantuan sosial melalui e-KYC dan biometrik, serta percepatan perekaman KTP-el. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pentingnya koordinasi antara BPS, Dukcapil, dan instansi terkait untuk memastikan data yang akurat dan transparan dalam pengambilan kebijakan publik. 4. Perlunya standardisasi dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memastikan konsistensi dan akurasi. 5. RUU tentang Statistik harus mencakup tata kelola data yang jelas, termasuk peran masing-masing instansi dan mekanisme akses data yang lancar. 6. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg. 7. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik. 	
4.	RUU tentang Statistik	RDP dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2025 pukul 13.49 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI 2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri KEMENDAG <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam proses statistik, mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemusnahan data. 2. Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyoroti terkait prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang harus dipatuhi untuk menjaga keamanan dan privasi data. 3. Kementerian Perdagangan menginginkan adanya penguatan peran statistik sektoral dan integrasi data lintas instansi sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya penggunaan data alternatif seperti <i>Big Data</i> dan <i>E-Commerce</i>, serta perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai keamanan data dan etika statistik. 5. RUU tentang Statistik diharapkan dapat memperkuat tata kelola data, meningkatkan interoperabilitas data, dan memastikan keamanan serta etika dalam pengelolaan data statistik. 6. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg. 7. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik. 	
5.	RUU tentang Statistik	RDP dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 pukul 10.51 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia 2. Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina 3. Direktur Retail dan Niaga PT PLN 4. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan dari PT Pupuk Indonesia terkait Perpres Satu Data Indonesia agar diatur dalam undang-undang untuk memperkuat integrasi data. 2. PT PLN dan Perum Bulog mendukung BPS sebagai otoritas data tunggal dengan tetap memberikan keleluasaan adanya pengumpulan data sektoral dan pengumpulan data untuk kebutuhan internal oleh masing-masing instansi. 3. PT Pertamina menekankan pentingnya integrasi data untuk perencanaan, terutama data terkait subsidi BBM dan mendukung kebijakan satu data tunggal yang akurat dan mutakhir. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.</p> <p>5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik.</p>	
6.	RUU tentang Statistik	RDP dilaksanakan pada Kamis, 24 April 2025 pukul 14.01 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas; 2. Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian; 3. Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial. <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappenas menekankan pentingnya statistik resmi negara yang ditetapkan oleh BPS dan koordinasi antar kementerian untuk memastikan keakurasian data. Bappenas juga menyoroti pentingnya data spasial dan keuangan yang terpisah dari NSO untuk menjaga independensi dan menghindari bias dalam hasil data. 2. Kementerian Perindustrian menyoroti pentingnya data untuk meningkatkan daya saing industri dan pentingnya koordinasi dengan BPS serta forum Satu Data Indonesia untuk menghasilkan data yang akurat. Kementerian Perindustrian menekankan kebutuhan pengakuan bahwa data industri dan kawasan industri berasal dari Kemenperin dan mendukung Satu Data Indonesia sebagai referensi bagi pemangku kepentingan. 3. Kementerian Sosial mengidentifikasi tantangan utama berupa keragaman sumber data pada satu topik yang sama dan menekankan 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pentingnya DTSEN sebagai rujukan nasional dalam program pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial juga menyoroti perlunya penguatan kewenangan BPS agar bisa menjadi rujukan data, baik makro maupun mikro.</p> <p>4. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.</p> <p>5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik.</p>	
7.	RUU tentang Statistik	RDP dilaksanakan pada Senin, 28 April 2025 pukul 10.50 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan 2. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia 3. Direktur Teknologi Informasi PT Bank Mandiri 4. Direktur Informasi Teknologi PT. Bank Rakyat Indonesia 5. <i>Head of Industry Research</i> PT Bank Central Asia <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OJK menekankan pentingnya menjaga sensitivitas dan kerahasiaan data keuangan dalam RUU tentang Statistik. OJK mendukung harmonisasi data dengan BPS, namun menekankan bahwa kewajiban berbagi data tidak boleh menambah beban administratif atau redundansi. OJK juga menyoroti pentingnya koordinasi dan sinkronisasi metodologi dengan BPS. 2. Bank Indonesia menjelaskan bahwa mereka memperoleh data melalui berbagai cara, termasuk survei yang dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga. Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar pembuatan 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kebijakan. BI telah melakukan kerja sama dengan BPS untuk memastikan data yang akurat dan relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bank Mandiri setuju dengan perlunya pengaturan yang jelas mengenai sejauh mana data mikro dapat diakses oleh BPS. Bank Mandiri mendukung revisi UU Statistik untuk memastikan data yang akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. BRI menyatakan dukungannya terhadap revisi UU Statistik. BRI menekankan pentingnya data yang akurat dan relevan untuk mendukung kegiatan perbankan dan pengambilan keputusan. 5. BCA juga mendukung revisi UU Statistik. BCA percaya bahwa data dari BPS adalah benar, namun menekankan perlunya tambahan data dari sumber eksternal untuk melengkapi informasi yang ada. 6. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg. 7. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik. 	
8.	RUU tentang Statistik	Raker/RDP dilaksanakan pada Senin, 28 April 2025 pukul 13.38 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Raker/RDP dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) 2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional 4. Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan 5. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian 6. Kapokja PUU Biro Hukum dan Kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup <p>Kesimpulan:</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. BIG menyatakan bahwa mereka akan menjadi Penyelenggara Statistik Sektoral jika melaksanakan kegiatan yang <i>outputnya</i> adalah data statistik. BIG menekankan pentingnya integrasi data statistik dengan data geospasial dan menyarankan agar pemutakhiran data statistik tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga oleh penyelenggara statistik sektoral dan khusus. BIG juga menyoroti perlunya <i>platform</i> untuk diseminasi data statistik dan perlindungan data statistik, termasuk infrastruktur dan data digital. 2. Kementerian ATR/BPN setuju dengan penguatan koordinator statistik nasional dan menekankan pentingnya sistem yang interoperabilitas. Kementerian ATR/BPN juga menyoroti pentingnya pemisahan fungsi teknis dan pengawasan statistik untuk memastikan data yang baik yang dapat mendukung kebijakan yang baik. 3. BNN menekankan pentingnya data yang valid, asli, dan terkini dari BPS. BNN menjelaskan bahwa sejak awal, BNN telah memproduksi data bersama BPS dan peta, sehingga data yang dihasilkan sudah valid. BNN mengadakan survei prevalensi setiap dua tahun yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk pembuatan kebijakan. BNN mendukung integrasi data spasial dengan data statistik untuk memastikan data yang akurat dan relevan. 4. Kementerian Kehutanan setuju dengan konsep satu data BPS dan menekankan pentingnya alokasi hutan lindung yang akurat. Kementerian Kehutanan juga menyarankan agar pemutakhiran data dilakukan dengan cepat dan akurat untuk mendukung kebijakan yang baik. 5. Kementerian Pertanian setuju dengan konsep satu data BPS dan idealnya sensus dilakukan setiap 3 tahun sekali, namun karena biaya yang besar, dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan catatan ada 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>survei antara. Kementerian Pertanian tetap berperan sebagai produsen data dan mendukung RUU tentang Statistik untuk memastikan data yang akurat dan relevan.</p> <p>6. Kementerian Lingkungan Hidup setuju dengan konsep satu data BPS dan menekankan pentingnya data yang selaras sampai tingkat kabupaten. Kementerian Lingkungan Hidup mendukung RUU tentang Statistik untuk memastikan data yang akurat dan relevan untuk mendukung kebijakan lingkungan hidup.</p> <p>7. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.</p> <p>8. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik</p>	
9.	RUU tentang Statistik	Rapat Panja dilaksanakan pada Senin, 28 April 2025 pukul 19.40 WIB	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan: TERTUTUP</p>	
10.	RUU tentang Statistik	Rapat Panja dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025 pukul 10.16 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan: TERTUTUP</p>	
11.	RUU tentang Statistik	Rapat Panja dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025 pukul 14.19 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan: TERTUTUP</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
12.	RUU tentang Statistik	Rapat Panja dilaksanakan pada Selasa, 29 April 2025 pukul 20.18 WIB	Badan Legislati melaksanakan Rapat Panja dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik. Kesimpulan: TERTUTUP	
13.	RUU tentang Statistik	RDP dilaksanakan pada Rabu, 30 April 2025 pukul 10.44 WIB.	Badan Legislati melaksanakan Raker/RDP dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik, dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI 2. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 4. Plt. Kepala Pusdatin Kementerian Pekerjaan Umum Kesimpulan: <ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPS mendukung data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai INPRES No.4 Tahun 2025. Diskusi awal terkait Sensus Ekonomi 2026. Penggunaan data BPS untuk perhitungan manfaat berkala dan upah tertinggi program Jaminan Pensiun. Data Sakernas digunakan untuk penetapan target cakupan kepesertaan dan iuran. Unit Kerja Manajemen Data dan Analitik mengelola data, termasuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendukung studi aktuarial dan evaluasi program jaminan sosial. Produk data statistik termasuk Tabel Mortalita BPJS Ketenagakerjaan. 2. BPJS Kesehatan Penggunaan data untuk pengambilan keputusan, memahami kebutuhan peserta, mendeteksi risiko, dan penyimpangan. Klasifikasi data berdasarkan tingkat kerahasiaan 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>(Rahasia, Terbatas, Biasa). Kontrol akses dan perlindungan data melalui enkripsi, manajemen backup, dan teknologi keamanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Korlantas Polri Pengelolaan data statistik lalu lintas nasional untuk mendukung kebijakan berbasis data. Penyampaian data ke BPS, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan instansi terkait lainnya. Evaluasi dan perumusan kebijakan keselamatan jalan. Perencanaan transportasi nasional. Penyusunan indikator pembangunan dan sarpras daerah berbasis lalu lintas. 4. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Perbedaan metodologi pengumpulan data, waktu pengumpulan, cakupan wilayah, definisi variabel, dan sumber data. Langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan data termasuk analisis mendalam, penyesuaian data, dan harmonisasi metodologi. BPS sebagai Pembina Statistik dan Mitra Kerja. Kementerian PU aktif memberikan rekomendasi dan masukan bagi pelaksanaan EPSS. Penyelenggaraan Ruang Belajar Data untuk SDM Kemen. PU. 5. BPS sebagai institusi penyelenggara statistik tanpa perlu Dewan Pengawas terpisah. Pertukaran data antar Kementerian/Lembaga tanpa perlu Nota Kesepahaman. Satu portal data statistik untuk seluruh level data. 6. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg. 7. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Statistik. 	
14.	RUU tentang Statistik	Rapat Baleg dilaksanakan pada	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Baleg dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan:</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Rabu, 30 April 2025 pukul 14.48 WIB.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil penyusunan RUU tentang Statistik. 2. Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui RUU tentang Statistik menjadi usul inisiatif Baleg dan hasil penyusunan RUU tentang Statistik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
15.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	RDPU dilaksanakan Pada Senin, 5 Mei 2025 Pukul 10.29 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan RDPU dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RUU tentang PPRT; 2. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT); 3. Koordinator Konsolidasi Mahasiswa Indonesia. <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU tentang PPRT menekankan pentingnya perlindungan bagi PRT yang sering mengalami kekerasan tanpa adanya perlindungan hukum. Selain itu juga meminta pengakuan resmi bagi PRT sebagai pekerja yang sah dan memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum. 2. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyatakan bahwa RUU yang disampaikan sangat progresif dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Menekankan bahwa harus dibuat undang-undang khusus terkait pekerja rumah tangga (PRT) dan tidak digabungkan dengan UU Ketenagakerjaan. Mengingatkan agar pembahasan RUU tidak menjadi kemunduran dari apa yang sudah ada. 3. Koordinator Konsolidasi Mahasiswa Indonesia mendesak agar RUU PPRT segera disahkan. Hal ini bukan hanya sebagai produk legislasi, tetapi juga sebagai bukti bahwa negara hadir memberikan jaminan 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sosial kepada masyarakat. Menyatakan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam proses legislasi ini untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terserap. Mengusulkan agar dilakukan perbandingan dengan negara lain untuk memastikan bahwa produk turunan RUU ini juga diperhatikan dan sesuai dengan standar internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg. 5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Argentina dilaksanakan pada 15-21 April 2025.	<p>Delegasi BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) mengadakan kunjungan diplomasi BKSAP ke Argentina pada tanggal 14-20 April 2025. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) 2. Bramantyo Suwondo (F-PD) <p>Pada 15 April 2025 delegasi BKSAP DPR RI yaitu, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng., Bramantyo Suwondo, M.Ir dan Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A., didampingi oleh Dubes RI untuk Argentina Sulaiman Syarif, melakukan pertemuan <i>courtesy call</i> dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Argentina dengan Republik Indonesia (Grupo Parlamentario de Amistad con La República de Indonesia/GPA) Hon.Karina Ethel Bachey yang didampingi sejumlah anggota GPA serta anggota Kongres, antara lain Hon.Rocío Bonacci, Hon. Belén Avico, Hon. María Cecilia Ibáñez, dan Hon.Pablo Giuliano. Turut hadir dalam pertemuan adalah perwakilan dari Direktorat Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri, Perdagangan International dan Agama, Republik Argentina, Gustavo Méndez dan Guillermo Mignini.</p> <p>Yang membahas sejumlah isu terkait perubahan iklim, penguatan ekonomi bilateral, serta kerja sama lebih luas berbagai bidang. Turut dibahas pending issues terkait kemudahan visa dan percepatan IM-CEPA.</p>	
2.	KSR - BKSAP	Rapat Koordinasi Pimpinan BKSAP dengan WFD dan <i>Civil</i>	Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) bersama Wakil Ketua BKSAP, Husein Fadhlulloh (F-PGerindra) melakukan Rapat Koordinasi dengan WFD dan Civil Society Organisations (CSO) dalam rangka menindaklanjuti	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p><i>Society Organisations (CSO)</i> dilaksanakan 18 April 2025.</p>	<p>pertemuan antara Delegasi Panitia Kerja <i>Open Government - Parliament (OG-P)</i> BKSAP DPR RI dengan WFD dan CSOs pada 20 Maret 2025 di Serpong.</p> <p>Shreya Basu, Chief, Country and Local Program <i>Open Government Partnership (OGP)</i> turut berpartisipasi dalam Rapat dan sepakat untuk menghubungkan antara <i>Open Government Indonesia (OGI)</i>, BKSAP dan rekan-rekan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam menyusun peta jalan (<i>roadmap</i>) sebagai rencana dan tujuan jangka panjang untuk mendukung implementasi pemerintahan dengan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>).</p> <p>Ke depan, OMS akan memberikan masukan dalam <i>road map Open Government - Parliament (OG-P)</i> agar lebih bersifat inklusif dan membuka keran partisipasi publik yang bermakna.</p>	
3.	KSR - BKSAP	<p><i>The 4th Meeting of the Coordinating Committee of WAIPA</i> dilaksanakan pada 21-24 April 2025.</p>	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang diwakili Marlyn Maisarah (F-PGerindra), Melly Goeslaw (F-PGerindra) dan Dr. Ade Rossi Khaerunnisa (F-PGolkar) menghadiri Sidang ke-4 <i>Coordinating Committee of WAIPA</i> tanggal 21-24 April 2025.</p> <p>Dalam sidang yang mengusung tema “<i>Steering Innovation, Inclusivity and Diversity Through Gender-Balanced Parliaments for a Future-Ready ASEAN</i>” Delegasi Indonesia menyampaikan intervensi yang menegaskan urgensi keterwakilan yang setara di parlemen dalam mendorong inovasi, inklusivitas, dan ketahanan ASEAN.</p> <p>Indonesia berkomitmen pada Rencana Aksi WAIPA dan mendorong kerja sama berkelanjutan antar Parlemen AIPA untuk memajukan kesetaraan gender di kawasan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Terkait <i>amandemen Rules of Procedure (RoP)</i> WAIPA, Indonesia mengusulkan untuk tetap menggunakan RoP yang ada saat ini, dengan tetap terbuka pada kemungkinan perubahan bila dibutuhkan, setelah mendengarkan pendapat dari seluruh Parlemen Anggota AIPA.</p>	
4.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP ke Chile dilaksanakan pada 21-27 April 2025.	<p>Delegasi BKSAP yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP, M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) mengadakan kunjungan diplomasi BKSAP ke Chile pada tanggal 21-27 April 2025. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) 2. Irine Yusiana Roba (F-PDIP) 3. Bramantyo Suwondo (F-PD) <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi mengadakan pertemuan dengan: Parlemen Chile</p> <p>Delegasi BKSAP DPR RI diterima Kelompok Persahabatan Chile-Indonesia di Kompleks Parlemen Chile (<i>Camara de Diputados</i>) di Valparaiso, Kamis (23/4/2025). Kedua parlemen memiliki Grup Kerja Sama Bilateral (<i>parliamentary friendship group</i>) di masing-masing pihak. Hal ini menandakan relasi dan hubungan kerja sama yang erat di antara kedua negara yang dipertahankan dan tingkatkan di masa mendatang.</p> <p>elegasi BKSAP bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan Chile dalam proses aksesi ke OECD. Diketahui, Chile menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2010, menjadikannya negara pertama dari Amerika Selatan yang bergabung dengan organisasi ini. Proses aksesi Chile ke OECD melibatkan berbagai reformasi penting di bidang kebijakan ekonomi, anti-korupsi, dan investasi asing.</p> <p>Proses aksesi (bergabung) ke OECD (Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan) melibatkan beberapa tahap, termasuk diskusi, penyusunan peta jalan, evaluasi, dan persetujuan dari Dewan OECD. Proses ini dimulai dengan permintaan formal dari negara yang ingin bergabung, dan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kemampuan dan kesiapan negara tersebut. Setelah evaluasi, Dewan OECD akan memutuskan apakah akan membuka diskusi akses dan menetapkan peta jalan yang mencakup persyaratan dan ketentuan.</p> <p>Kedua delegasi juga menggarisbawahi mengenai peran penting parlemen dalam proses akses OECD. Parlemen berperan penting dalam menggali dukungan politik yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan proses akses. Parlemen juga berperan penting dalam merumuskan dan meratifikasi regulasi yang sejalan dengan standar OECD serta mengawasi pelaksanaan implementasi reformasi seperti yang disyaratkan OECD.</p> <p>Selain hal di atas, kedua delegasi juga membicarakan peluang kedua negara dapat bekerja sama lebih erat dalam kerangka IC-CEPA. Kedua parlemen mendorong peningkatan potensi perdagangan dan kemitraan ekonomi kedua negara pasca implementasi IC-CEPA pada 2019.</p> <p>Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR ini juga sebagai dukungan bagi Pemerintah RI yang berkomitmen terus mendorong produk Indonesia masuk ke pasar nontradisional, salah satunya kawasan Amerika Selatan. Chile memiliki posisi strategis di antara negara-negara Amerika Selatan lainnya karena dapat menjadi akses masuk bagi produk Indonesia ke kawasan wilayah Amerika Selatan.</p>	
5.	KSB - BKSAP	Audiensi BKSAP dengan Delegasi Komite Koordinasi Ulama Palestina dan Yayasan Wafaa Indonesia dilaksanakan 22 April 2025.	BKSAP DPR RI menerima audiensi dari Delegasi Komite Koordinasi Ulama Palestina dan Yayasan Wafaa Indonesia, yang diterima secara langsung oleh Anggota BKSAP DPR RI Eva Monalisa (F-PKB/A-31) di Ruang Diplomasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/04/2025). Pertemuan tersebut membahas terkait dukungan penuh Indonesia, khususnya berbagai langkah diplomasi parlemen, dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan terhadap isu kemanusiaan di Palestina. BKSAP	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>DPR RI juga terus berkomitmen untuk menyuarakan isu Palestina dalam berbagai fora parlemen internasional seperti IPU, APA, AIPA serta PUIIC yang akan digelar dalam waktu dekat.</p> <p>Parlemen Indonesia juga turut mendukung berbagai pelaksanaan focus group discussion dari berbagai organisasi kemanusiaan Palestina di Indonesia, serta mendorong terus diberikannya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina oleh Pemerintah Indonesia. Masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap produk-produk Israel.</p> <p>Sebelum pertemuan berakhir, Ketua Delegasi juga sempat mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi terhadap berbagai dukungan dan upaya yang telah ditempuh baik oleh Pemri atau DPR RI dalam mendukung kebebasan Palestina. Pihaknya juga berharap agar dukungan terhadap Palestina dapat terus berlanjut tidak hanya di meja negosiasi, tetapi dalam bentuk aksi nyata.</p> <p>Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden Asosiasi Ulama Palestina/Ketua Komite Koordinasi Ulama untuk Palestina, Dr. Nawwaf Takruri, Presiden Asosiasi Kebangkitan Ulama Yaman dan Anggota Dewan Administratif Komite Koordinasi Ulama untuk Palestina, Dr. Abdullah Abdul Majid Al Zindani, serta pihak Yayasan Wafaa Indonesia Mr. Izharul Haq.</p>	
6	KSR - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Argentina dilaksanakan pada 23 April 2025.	<p>GKSB DPR RI - Parlemen Argentina mengadakan Rapat Internal guna membahas program kerja GKSB DPR RI - Parlemen Argentina serta rencana kunjungan GKSB ke Buenos Aires Argentina (23/04/25).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Argentina menyampaikan pentingnya GKSB menjadi jembatan penguatan hubungan bilateral RI - Argentina. Kedua negara dapat bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan pertanian serta perdagangan. Ketua GKSB DPR</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>RI - Parlemen Argentina juga menekankan pentingnya agar DPR RI dan Parlemen Argentina dapat mendorong percepatan ratifikasi <i>Indonesia - Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IM-CEPA) guna meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Mercosur.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Argentina, Sturman Panjaitan (F-PDIP), Muslim Ayyub (F-PNasdem) dan Iman Sukri (F-PKB).</p>	
7	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Romania dengan Dubes Romania dilaksanakan pada 24 April 2025	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Romania menggelar pertemuan (<i>Courtesy Call</i>) dengan Duta Besar Romania untuk Indonesia, H.E. Mr. Dan Adrian Balanescu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).</p> <p>Pertemuan membahas terkait rencana kunjungan GKSB Romania untuk bertemu dengan Parlemen Romania dalam waktu dekat. Nantinya dalam kunjungan tersebut, kedua pihak akan membahas potensi kolaborasi antar-parlemen dan kerja sama multisektor kedua negara.</p> <p>Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Romania, Ir. H. Sahidin (F-PAN), dan Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Romania, Dr.Tr. Agun Gunandjar S., Bc.I.P., M.Si. (F-PGolkar).</p>	
8.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Romania ke Bucharest, Romania dilaksanakan pada 26 April – 2 Mei 2025.	<p>Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Romania mengadakan kunjungan ke Bucharest, Romania pada tanggal 26 April – 2 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sahidin (F-PAN) / Ketua Delegasi 2. Shanty Alda Nathalia (F-PDIP) / Anggota Delegasi 3. Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) / Anggota Delegasi 4. Tonny Tesar (F-Pnasdem) / Anggota Delegasi 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dalam kunjungan tersebut, Delegasi mengadakan pertemuan dengan: <i>Parliamentary Friendship Group</i> Romania with Indonesia Komisi Industri Parlemen Romania.</p>	
9.	KSB - BKSAP	<p>Rapat Koordinasi GKSB DPR RI – Parlemen Kosta Rika dengan Direktorat Amerika I Kementerian Luar Negeri RI dilaksanakan pada 28 April 2025.</p>	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Kosta Rika menggelar rapat koordinasi dengan Direktorat Amerika I Kementerian Luar Negeri RI yang dilakukan secara virtual. Pertemuan tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua GKSB Kosta Rika Dr. Daniel Johan, S.E., M.M (F-PKB) dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).</p> <p>Pertemuan membahas rencana kunjungan GKSB Kosta Rika untuk bertemu dengan Parlemen Kosta Rika dalam waktu dekat. Parlemen Indonesia perlu menjajaki potensi yang dapat menjadi kolaborasi Indonesia dan Kosta Rika.</p> <p>Sektor kerja sama yang akan dijalin tidak hanya dalam koridor kerja sama antar-parlemen, tetapi juga membuka peluang kerja sama sektor lainnya, salah satunya bidang industri perkeretaapian dan sektor energi terbarukan. Pertemuan bermaksud menjaring masukan pihak Kemlu RI terkait persiapan kunjungan tersebut.</p>	
10.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> GKSB Argentina dengan CDA Kedutaan Besar Argentina dilaksanakan pada 29 April 2025.</p>	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Argentina menerima <i>Charge d'affaires</i> Kedutaan Besar Argentina, Mr. Ignacio Lacunza, pada hari Selasa (29/04/25).</p> <p>Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Argentina @martinmanurung menggelar pertemuan <i>courtesy call</i> dengan <i>Charge d'Affaires</i> Kedutaan Besar Argentina untuk Indonesia Mr. Ignacio Lacunza di Gedung DPR RI.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pertemuan membahas berbagai tantangan dan peluang kerja sama bilateral Indonesia dan Argentina, khususnya terkait bidang perdagangan.</p>	
11.	KSR - BKSAP	<p>Kunjungan Kerja Panja <i>Open Government Parliament</i> (OGP) BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 29 April 2025</p>	<p>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo (F-PDemokrat) dan Irine Yusiana Roba Putri, MCOMN&MEDIAS (F-PDIP) bersama Anggota BKSAP Himmatul Aliyah (F-PGerindra), Fatih (F-PDemokrat), Djazuli Juwaini (F-PKS), dan Verrel Bramasta (F-PAN) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau kesiapan dan perkembangan penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) keterbukaan dalam kerangka <i>Open Government Partnership</i> (OGP) lokal.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menekankan tujuan kunjungan sebagai upaya menggali informasi mendalam mengenai proses ko-kreasi antara Pemprov Jabar dan masyarakat sipil dalam merancang Renaksi OGP yang ambisius namun realistis.</p> <p>Dengan tergabungnya Jawa Barat secara resmi sebagai anggota baru OGP local bersama dengan DIY dan Kota Madiun sejak 2024, peran penting pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif semakin dibutuhkan.</p> <p>Bramantyo juga menekankan pentingnya partisipasi publik dan kehadiran instrumen legal yang kuat agar program keterbukaan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berimplikasi nyata bagi warga. Ia menyebut pengalaman Bojonegoro sebagai pelajaran penting.</p> <p>Melalui kunjungan ini, DPR RI berharap dapat menyerap masukan langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk kemudian dirumuskan dalam strategi parlemen dalam mendukung agenda keterbukaan nasional dan internasional.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bramantyo menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang digital untuk kepentingan ekonomi maupun dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Penggunaan media sosial secara positif dan produktif juga ditekankan menjadi kunci dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan informatif.</p> <p>Upaya literasi digital di Jawa Barat menjadi bagian dari strategi lokal dalam mewujudkan prinsip-prinsip OGP, yang bertujuan memperkuat keterbukaan informasi, akuntabilitas pemerintahan, dan partisipasi publik secara menyeluruh di era digital.</p>	
12.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB Kazakhstan dilaksanakan pada 30 April 2025.	<p>Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Kazakhstan I Wayan Sudirta (F-PDIP) memimpin rapat internal GKSB DPR RI - Parlemen Kazakhstan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Kazakhstan M. Husni (F-PGerindra).</p> <p>Rapat digelar guna membahas membahas rencana kunjungan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Dalam kunjungan tersebut nantinya, Delegasi GKSB akan bertemu dengan Parlemen Kazakhstan dan sejumlah kementerian terkait lainnya, guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.</p>	
13.	KSI - BKSAP	<i>Embassy Briefing 19th PUIC Conference</i> dilaksanakan pada 30 April 2025.	<p>Dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya <i>Parliamentary Union of the OIC Member States</i> (PUIC), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19 yang akan berlangsung di Jakarta pada 12–15 Mei 2025.</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, dalam pidatonya saat <i>embassy briefing</i> di Gedung Nusantara, Rabu (30/5/2025), menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas antarbangsa melalui nilai persatuan dan saling pengertian.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dengan mengangkat tema “<i>Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience</i>,” Konferensi PUIC ke-19 akan membahas berbagai isu strategis, antara lain dukungan terhadap Palestina, perlindungan hak minoritas Muslim, penguatan peran perempuan dan pemuda dalam politik, serta kerja sama Selatan-Selatan.</p> <p>Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia siap berkontribusi aktif dalam mempererat kerja sama parlemen negara-negara anggota PUIC, memperkuat institusi, dan membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berdaya saing.</p>	
14.	KSR - BKSAP	Kunjungan Kerja Panja <i>Open Government Parliament (OGP)</i> BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 2 Mei 2025.	<p>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah Pemprov DIY dalam pelaksanaan <i>Open Government</i> yang dinilai inovatif dan inisiatif. Hal ini ia sampaikan usai memimpin kunjungan kerja Panja <i>Open Government Parliament (OGP)</i> BKSAP DPR RI ke DIY, Jumat (2/5/2025).</p> <p>“Banyak inisiatif baru dalam pemanfaatan teknologi digital yang fokus pada penanggulangan bencana serta pengentasan kemiskinan. Ini memperkaya Rencana Aksi Nasional (RAN) Panja OGP,” ungkap Mardani.</p> <p>Disamping memperkuat kerja Panja OGP dalam menyusun rekomendasi kebijakan, Mardani juga mendorong penguatan pelaksanaan dalam tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah daerah.</p>	
15.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia dilaksanakan pada 5 Mei 2025.	<p>Pimpinan BKSAP serta Anggota GKSB Ceko mengadakan <i>Courtesy Call</i> dengan Duta Besar Republik Ceko, H.E. Mr. Jaroslav Dolecek pada hari Senin (05/05/2025).</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana kunjungan kehormatan Wakil Ketua Chamber of Deputies Republik Ceko, H.E. Mr. Jan Skopecek pada tanggal 12 - 17 Mei 2025 ke Indonesia. Dalam kunjungan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tersebut, delegasi berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, BKSAP, Kemlu RI, Kementerian Energi dan KADIN. Duta Besar Republik Ceko menyatakan bahwa dukungan BKSAP amat penting dalam suksesnya pelaksanaan kunjungan tersebut.</p> <p>Selain membahas rencana kunjungan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), juga menyampaikan pentingnya dukungan Parlemen dan Pemerintah Republik Ceko dalam mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia - <i>European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (I-EU CEPA). Perjanjian ekonomi dan perdagangan tersebut diharapkan dapat memberi benefit bagi penguatan hubungan ekonomi kedua pihak.</p> <p>Turut hadir dalam pertemuan tersebut, jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ravindra Airlangga (F-PG), Bramantyo Suwondo (F-PD) serta Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Ceko, Dra. Lucy Kurniasari (F-PD).</p>	
16.	KSI - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Delegasi Perwakilan OECD dilaksanakan pada 5 Mei 2025.	<p>Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI melakukan pertemuan dengan delegasi <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (OECD)/Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Pertemuan yang dilaksanakan di Kompleks DPR RI, Senin (5/5/2025) ini, BKSAP mendukung akses Indonesia untuk mendapatkan keanggotaan penuh pada OECD. BKSAP berpandangan, Proses akses Indonesia ke OECD bukan semata-mata teknis, tetapi juga bersifat politis.</p> <p>Dan yang terpenting adalah Parlemen akan memastikan bahwa keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi bangsa. Selama ada keuntungan strategis dan ekonomi yang jelas, DPR siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam proses akses ini.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pertemuan dengan delegasi OECD dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ravindra Airlangga (F-Golkar), M. Husein Fadlulloh (F-Gerindra) dan Bramantyo Suwondo (F-Demokrat).</p>	
17.	KSB - BKSAP	<p>Rapat Koordinasi GKSB Kosta Rika dengan Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri dilaksanakan pada 5 Mei 2025.</p>	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Kosta Rika menggelar rapat koordinasi dengan Direktur Amerika I Kementerian Luar Negeri RI Iwan Freddy Hari Susanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).</p>	
18.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar Aljazair untuk Indonesia dilaksanakan pada 5 Mei 2025.</p>	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Aljazair, H.E. Mr. Abdelouhab Osmane, yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini (5/5/2025).</p> <p>Pada pertemuan tersebut, Dubes Osmane menekankan kuatnya ikatan historis antara kedua negara sejak Konferensi Asia Afrika 1955, serta pentingnya memperkuat diplomasi antar-parlemen dan kerja sama ekonomi. Aljazair juga akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi untuk menghadiri Konferensi PUIC di Jakarta pada bulan Mei mendatang. Ketua BKSAP DPR RI menyambut baik partisipasi tersebut dan siap memfasilitasi pertemuan bilateral antara delegasi Aljazair dan mitra parlemen Indonesia. Kedua pihak juga menegaskan komitmen bersama dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong kerja sama konkret di sektor strategis seperti sektor mineral dan energi.</p> <p>Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua BKSAP DPR RI I, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) bersama Wakil Ketua BKSAP diantaranya Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ravindra Airlangga (F-PG) dan Bramantyo Suwondo (F-PD).</p>	
19.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP dengan Duta Besar</p>	<p>Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS) menerima kunjungan dari Duta Besar Negara Rwanda H.E. Mr. Abdul Karim Hareliman pada hari</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Rwanda untuk Indonesia dilaksanakan pada 5 Mei 2025.	<p>Senin (05/05/2025). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ravindra Airlangga (F-PG), Bramantyo Suwondo (F-PD).</p> <p>Tujuan pertemuan ini adalah membahas bagaimana cara memperkuat hubungan antara Rwanda dan Indonesia, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan Nota Kesepahaman (MoU) dan pembentukan kelompok persahabatan (<i>Friendship Group</i>). Diharapkan melalui pertemuan ini akan terwujud saling kunjung antara pihak Rwanda dan pihak Indonesia. Selain itu, pertemuan ini juga mengulas praktik pengelolaan sampah (<i>waste management</i>) yang telah diterapkan di Rwanda dengan harapan Indonesia dapat mengadaptasi praktik tersebut.</p>	
20.	KSR - BKSAP	<i>The 2nd Consultative Meeting of Young Parliamentarians of AIPA</i> dilaksanakan pada 5 – 8 Mei 2025.	<p>Delegasi Indonesia terdiri dari Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo Suwondo (F-PDemokrat) dan Anggota BKSAP, Adde Rosi Khoerunnisa (F-P. Golkar), serta Stevano Rizki Adranacus (F-PDIP) menghadiri Sidang Konsultatif Kedua Anggota Parlemen Muda AIPA (YPA) yang diselenggarakan di Selangor, Malaysia, pada 6 Mei 2025.</p> <p>Dalam intervensinya, delegasi DPR RI menekankan peran penting generasi muda Indonesia sepanjang sejarah dalam membangun bangsa. Indonesia menggarisbawahi investasi terhadap generasi muda sebagai kunci utama dalam mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.</p> <p>Dari segi legislasi, Undang-Undang Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 menjamin partisipasi pemuda dalam program-program nasional dan menyediakan sarana serta prasarana yang inklusif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, tanpa diskriminasi. DPR RI mendorong penciptaan mekanisme yang mendukung keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk penyediaan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>platform</i> inklusif, pelatihan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, layanan kesehatan mental dan fisik, serta infrastruktur yang mendukung inovasi dan kewirausahaan.</p>	
21.	KSB - BKSAP	Ketua BKSAP dan Ketua GKSB Belarusia menghadiri Undangan <i>80th Anniversary of the Victory of the Soviet People in the Great Patriotic War</i> , Minsk Belarus dilaksanakan pada 5-11 Mei 2025.	Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Belarus Isfhan Taufik Munggaran (F-PG) menghadiri undangan perayaan <i>80th Anniversary of the Victory of the Soviet People in the Great Patriotic War</i> , Minsk Belarus.	
22.	KSB - BKSAP	Rapat Pimpinan ke-6 BKSAP dilaksanakan pada 6 Mei 2025.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) memimpin Rapat Pimpinan ke-6 di Gd. Nus III Lt. 6, pada Selasa (6/5/2025).</p> <p>Rapim ke-6 BKSAP DPR RI membahas persiapan BKSAP dalam menjadi tuan rumah sidang <i>19th Session of PUIC Conference</i> pada bulan Mei 2025, rencana partisipasi BKSAP di <i>BRICS Parliamentary Forum</i> serta berbagai agenda penerimaan delegasi luar negeri di Indonesia dan kegiatan - kegiatan lainnya.</p> <p>Turut hadir dalam Rapim BKSAP jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Ravindra Airlangga (F-PG) dan M. Husein Fadlulloh (F-PGerindra) serta pejabat Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional.</p>	
23.	KSB - BKSAP	<i>Friendly Talk</i> BKSAP dengan Parlemen Prefektur Mie dilaksanakan pada 6 Mei 2025.	Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan 5 anggota parlemen daerah dari prefektur Mie asal Jepang membahas tindak lanjut kerja sama penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>“Karena Jepang termasuk ‘aging society’, masyarakat yang menua kita rata-ratanya 29,4 tahun usianya. Jadi sangat fit sekali kalau Indonesia mengirim tenaga kerja ke Jepang.” ujar Mardani saat wawancara dengan Parleментарia dan awak media usai menerima audiensi dengan parlemen daerah yang digelar di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).</p> <p>Sebagaimana disampaikan sebelumnya, saat ini Jepang tengah menghadapi fenomena masyarakat yang menua, diperkirakan membutuhkan sekitar 3,4 juta tenaga kerja dari luar negeri di berbagai sektor seperti kesehatan dan manufaktur. Dengan rata-rata usia penduduk Indonesia yang masih tergolong muda, sekitar 29,4 tahun, Indonesia dinilai sebagai mitra yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.</p>	
24.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> BKSAP dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia dilaksanakan pada 6 Mei 2025.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Iran untuk Indonesia, H.E. Mr. Mohammad Boroujerdi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini (6/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, dibahas persiapan kedatangan delegasi parlemen Republik Islam Iran yang akan menghadiri pertemuan PUIC, termasuk kehadiran Ketua Parlemen Iran, Y.M. Mohammad Bagher Ghalibaf, pada 14 Mei mendatang.</p> <p>Kedua pihak membahas sejumlah agenda penting, termasuk rencana pertemuan bilateral dengan Presiden RI dan Ketua DPR RI. Duta Besar Iran juga menyampaikan pentingnya dukungan koordinasi protokol dan keamanan, serta kesiapan fasilitas bagi delegasi, media, dan tim pengamanan. DPR RI melalui BKSAP memastikan akan menyambut dan memfasilitasi delegasi Iran dengan sebaik-baiknya.</p> <p>Pertemuan ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara parlemen Indonesia dan Iran. Ketua BKSAP menegaskan komitmen untuk</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>terus memperkuat kerja sama antarpemerintah dan menyukseskan rangkaian pertemuan PUIK yang akan datang.</p>	
25.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Turkiye dengan Duta Besar Turkiye untuk Indonesia dilaksanakan pada 6 Mei 2025.</p>	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Turkiye menerima <i>Courtesy Call</i> dengan Duta Besar H.E. Mr. Prof. Dr. Talip Kucukcan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (6/5/2025).</p> <p>Pertemuan ini dipimpin oleh H. Totok Daryanto, S.E. sebagai ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Turkiye. Kedua belah pihak saling mengapresiasi atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada pertemuan tersebut.</p> <p>Dalam pertemuan ini ada beberapa poin penting yang dibahas yaitu terkait permohonan bebas visa (negara Turkiye) bagi warga negara Turkiye yang akan berkunjung ke Indonesia dan perihal penerbangan Turkish Airlines. Selain itu, membahas potensi lain seperti pariwisata yang memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.</p> <p>Melalui pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Turkiye kedepannya dan adanya saling kunjung diantara kedua belah pihak.</p>	
26.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Kolombia dengan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia dilaksanakan pada 7 Mei 2025.</p>	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Kolombia menerima kunjungan kehormatan CDA Kedutaan Besar Kolombia, Mr. Carlos Duenas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini (7/5/2025).</p> <p>Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI–Parlemen Kolombia Dr. H. Jazuli Juwaini (F-PKS) ini menjadi langkah awal yang positif untuk menjajaki berbagai potensi kerja sama, khususnya di bidang pertanian, ketahanan pangan, kelapa sawit, dan pariwisata.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kedua pihak juga membahas rencana kunjungan ke Kolombia, guna menindaklanjuti potensi kerja sama ketahanan pangan, dengan usulan kunjungan ke Kota Palmira yang menjadi pusat riset pertanian tropis dunia. Melalui diplomasi parlemen, diharapkan hubungan Indonesia dan Kolombia semakin kokoh dan bermanfaat bagi rakyat kedua negara.</p>	
27.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Jepang dilaksanakan pada 7 Mei 2025.	<p>Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Jepang Rachmad Gobel (F-PNasDem) memimpin rapat internal GKSB DPR RI - Parlemen Jepang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (7/5/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Jepang yaitu H. Haryanto (F-PDIP) dan Novita Wijayanti (F-PGerindra).</p> <p>Rapat digelar guna membahas membahas rencana kunjungan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua GKSB Jepang dan Ketua BKSAP juga telah menerima perwakilan dari Anggota DPRD Prefektur Mie, Jepang.</p>	
28.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Rusia dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia dilaksanakan pada 8 Mei 2025.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Rusia Mengadakan dengan Duta Besar Negara Rusia H.E. Mr. Sergei Gennadievich TOLCHENOV , Jakarta, pada Kamis (08/05/2025). Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua GKSB Rusia Dr. Dr. Wihadi Wijanto, S.H., M.H. (FP-Gerindra/A-129) dan dihadiri oleh anggota GKSB Rusia Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM (F-PKS/A-469)</p> <p>Dalam pertemuan ini membahas rencana kunjungan delegasi parlemen Rusia ke Indonesia dan rencana kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Rusia untuk bertemu dengan anggota Parlemen Rusia dalam waktu dekat</p> <p>Pertemuan tersebut menyoroti hubungan kerja sama strategis antara Rusia dan Indonesia di berbagai sektor, dan secara khusus membahas potensi</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kerja sama di bidang pendidikan, yaitu terkait pemberian beasiswa dari Rusia untuk warga Indonesia yang ingin bersekolah ke Rusia.	
29.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua GKSBR DPR RI – Parlemen Bahrain dengan Dubes Bahrain dilaksanakan pada 9 Mei 2025.	Ketua GKSBR DPR RI – Parlemen Bahrain, Musa Rajekshah (F-PG) mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, guna membahas penguatan kerja sama RI – Bahrain dalam berbagai bidang khususnya dalam kerja sama antar-parlemen.	
30.	KSB - BKSAP	BKSAP DPR RI menghadiri perayaan <i>European Day</i> dilaksanakan pada 9 Mei 2025.	Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI menghadiri resepsi <i>European Day</i> .	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	1. Rapat Pimpinan 2. Rapat Intern Dilaksanakan pada hari Kamis, 17 April 2025.	- Membahas Program Kerja MKD Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025; - Membahas pengaduan dan surat-surat masuk; - Lain-lain.	
2.	DPRD Kabupaten Konawe	Rapat audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025.	Konsultasi terkait Pembentukan SOP dalam mengatasi permasalahan kedisiplinan Anggota DPRD.	
3.	-	Kunjungan Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan ke Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta dilaksanakan pada Kamis – Sabtu, 24 s.d. 26 April 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsinya terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI, ke Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta.	
4.	Kepolisian Resor Karawang	Kunjungan Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan dilaksanakan pada Senin – Rabu, 28 s.d. 30 April 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsinya terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI, ke Kepolisian Resor Karawang.	
5.	-	Rapat Audensi dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025.	Konsultasi terkait Studi Komparasi terkait Tata Cara Penegakan Kode Etik.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	<p>Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka Penguatan Kelembagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 15-21 April 2025 ke Republik Italia. 2. Tanggal 22-28 April 2025 ke Konfederasi Swiss. 	<p>Tujuan Kunjungan Kerja luar negeri delegasi BURT DPR RI ini adalah untuk mempelajari dan berdiskusi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah dipraktikkan oleh parlemen negara lain. 2. Model dan mekanisme komunikasi antara anggota parlemen dengan konstituennya. 3. Manajemen penganggaran parlemen. 4. Manajemen kepegawaian parlemen. 5. Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen. 6. Perencanaan dan implementasi <i>e-parliament</i>. 7. Manajemen sistem pendukung (<i>supporting system</i>) Parlemen yang bertugas memberi dukungan keahlian, teknis, dan administratif. 	
2.		<p>Rapat Penetapan Penggantian Wakil Ketua BURT dari Fraksi Partai Golkar dipimpin Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra dilaksanakan pada hari Senin, 5 Mei 2025.</p>	<p>Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (A-565/Fraksi Partai Demokrat/Banten 1) Wakil Ketua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indah Kurnia, S.E., M.M. (A-214/Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Jawa Timur I) 2. Alien Mus, S.Sos. (A-362/Fraksi Partai Golongan Karya /Maluku Utara) 3. Hj. Novita Wijayanti, SE., MM. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			(A-114/Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya/Jawa Tengah VIII) 4. Dr. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi (A-504/Fraksi Partai Amanat Nasional/Jawa Barat IV)	
3.	Rapat BURT (Intern)	Rapat BURT (Intern) Senin, 5 Mei 2025 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS III Tahun Sidang 2024-2025.		
4.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Agenda: Pembahasan Draf Renstra DPR RI Tahun 2025-2029.	Pimpinan BURT akan berkonsultasi dengan Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra terkait dengan payung hukum Renstra DPR RI Tahun 2025-2029.	
5.	Setjen DPR RI	Rapat BURT dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Agenda: Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2025	Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp1.383.785.722.117,- (<i>Satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah</i>) atau 20,84% dari pagu sebesar Rp6.607.167.185.000,- (<i>Enam triliun enam ratus tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah</i>).	
6.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Agenda: Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI	Realisasi anggaran Satker Dewan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp1.065.858.287.151,- (<i>Satu triliun enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah</i>) atau 20,86% dari pagu sebesar Rp5.109.747.073.000,- (<i>Lima triliun</i>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Triwulan I Tahun 2025 Satker Dewan.	<i>seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).</i>	
7.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Agenda: Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2025 Satker Setjen.	Realisasi anggaran Satker Setjen sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp317.927.434.966,- (<i>Tiga ratus tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah</i>) atau 21,23% dari pagu sebesar Rp1.497.420.112.000,-. (<i>Satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua belas ribu rupiah</i>).	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> •Kementerian Keuangan •Kementerian PPN / Bappenas •Bank Indonesia 	Rapat Koordinasi dengan agenda Penyesuaian Jadwal Siklus Pembahasan APBN di Badan Anggaran DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025.	<p>Berdasarkan surat undangan dari Biro Persidangan II kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Departemen Komunikasi BI (No: B/336/AG.06.01/04/2025) • Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas (No: B/335/AG.06.01/04/2025) • Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI (B/334/AG.06.01/04/2025) <p>Pada tanggal 21 April 2025, perihal Undangan Rapat Koordinasi.</p>	
2.	DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Audiensi terkait “Mekanisme Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025” dilaksanakan pada hari Kamis, 24 April 2025.	Berdasarkan surat dari DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Badan Anggaran DPR RI nomor 170/148/DPRD-LK/IV/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Konsultasi Badan Anggaran.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan BAKN	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025 pukul 10.00 WIB.	Tertutup.	
2.	- Pimpinan BAKN - Anggota BAKN	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025 pukul 11.00 WIB.	Tertutup.	
3.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN)	Kunjungan Kerja BAKN ke PT Perkebunan Nusantara I Regional 2, Bogor, Jawa Barat dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Mei 2025.	<p>Pertemuan dengan PTPN dihadiri oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan BAKN DPR RI - Anggota BAKN DPR RI - Pimpinan PT Perkebunan Nusantara: <ul style="list-style-type: none"> • Mohammad Abdul Ghani, (Direktur Utama Holding PTPN III Persero) • Sdr. Teddy Yunirman Danas (Direktur Utama PTPN I) • Sdr. Tio Handoko (Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I) • Sdr. Landi Rizaldi Mangaweang (Direktur Pemasaran & Aset Manajemen PTPN I) <p>Kesimpulan hasil kunjungan kerja antara lain sebagai berikut: 1) Pada 1 Desember 2023, terdapat sembilan unit PTPN yang melakukan merger menjadi PTPN I. Tujuan dari merger tersebut untuk optimalisasi aset di PTPN I karena merupakan pilar utama dalam kebijakan strategis untuk mencapai sumber <i>revenue stream</i>, sebagai <i>value creation</i> karena kegiatan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>operational excellent</i> dari komoditi teh belum mencapai keuntungan (<i>on farm</i> dan <i>off farm</i>), optimaliasi aset yang belum produktif agar dapat menghasilkan pendapatan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan serta diharapkan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.</p> <p>2) Permasalahan Permasalahan di sektor perkebunan mencakup hilangnya aset tanaman teh di Kebun Malabar seluas 166,627 Ha pada 2024 dan 72,373 Ha pada Januari–April 2025 akibat penyerobotan lahan oleh pihak luar untuk hortikultura. Di Jawa Barat, terdapat penguasaan lahan ilegal seluas 11.812,49 Ha yang disertai perusakan, dengan potensi kerugian mencapai Rp3,6 triliun bagi pihak perkebunan.</p> <p>3) Kinerja keuangan PTPN I Regional 2 hingga Maret 2025 menunjukkan hasil positif, dengan penjualan komoditas mencapai Rp1,04 triliun dan pendapatan dari sektor lain seperti hortikultura, agrowisata, dan kayu sebesar Rp447 miliar, yang memperkuat posisi perusahaan.</p> <p>4) Terkait temuan dalam LHP BPK Nomor 25/LHP/XX/2024, PTPN VIII menjelaskan bahwa dari 12 temuan dan 39 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2024, 38 rekomendasi sedang dalam proses tindak lanjut, sementara satu rekomendasi terkait pemeriksaan investigasi mengenai pemilihan mitra dan perjanjian pemanfaatan lahan PTPN I melalui mekanisme KSU dan KSS periode 2021–2023.</p> <p>5) BAKN meminta penjelasan mengenai permasalahan tata kelola perkebunan yang belum optimal dan dampaknya bagi pemerintah serta masyarakat. BAKN juga meminta PTPN I untuk memberikan tanggapan terkait temuan berulang yang belum terselesaikan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI	Rapat Dengar Pendapat (Terbuka) dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.	<p>RDP BAKN DPR RI dengan BPKP RI dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A dengan agenda acara melanjutkan rapat tanggal 4 Maret 2025 dalam rangka verifikasi Harga Pokok Penjualan (HPP) dan pemeriksaan subsidi pupuk.</p> <p>Kesimpulan RDP antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reviu HPP Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 dan 2025 oleh BPKP dimulai sejak adanya kontrak pada 11 Januari 2024 antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, yang menggunakan HPP hasil audit BPK Tahun 2022 sebagai dasar, termasuk untuk HPP tahun 2024 dan 2025 2) Hasil review BPKP atas HPP pupuk bersubsidi prognosis tahun 2024 dan 2025 adalah BPKP melakukan koreksi sebesar Rp3.423.118.570.327,- (<i>Tiga triliun empat ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah</i>) sehingga hasil review BPKP menjadi sebesar Rp47.274.090.167.469,- (<i>Empat puluh tujuh triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan ribu rupiah</i>) 3) Rancangan pengawasan BPKP atas mandat Perpres Nomor BA6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi mencakup tiga aspek utama, yaitu akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, pengadaan dan penyaluran, serta penagihan dan pembayaran. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM)	RDPU dengan agenda Mendengarkan Aspirasi dari Koalisi Ojol Nasional terkait Ketidakjelasan Status Pekerjaan dan Hubungan Kerja Kemitraan dengan Pihak Perusahaan Aplikator dilaksanakan pada hari Rabu, 23 April 2025.	<p>1. Koalisi Ojol Nasional menyampaikan aspirasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Status belum diakui oleh pemerintah. Ojol butuh perlindungan secara hukum, karena tanpa perlindungan, pihak aplikator bisa mengeksploitasi, baik secara fisik dan psikis. 2) Meminta agar kejelasan status bisa diimplementasikan. 3) Perusahaan Aplikator kerap menerapkan program-program yang merugikan pengemudi <i>online</i>. Hal tersebut dianggap sah-sah saja karena tidak ada regulasi yang mengatur. 4) Sepuluh tahun keberadaan Ojol diabaikan, tanpa aturan dan status yang jelas. 5) Memohon untuk perlindungan hukum dan kesejahteraan, serta bisnis yang berkeadilan. 6) Sebenarnya di Aplikator itu ada santunan bantuan, seperti santunan kematian, namun tidak sepenuhnya diberikan, karena pihak aplikator tidak transparan. 7) Pada tahun sebelumnya, Bantuan Hari Raya (BHR) untuk Ojol sebenarnya sudah ada, namun tidak sebesar saat ini. Dampak BHR hari ini adalah adanya program hemat yang dibuat pihak aplikator sebagai strategi 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>untuk mengembalikan dana yang telah diberikan sebagai BHR.</p> <p>8) KON berharap Badan Aspirasi Masyarakat bisa memberikan payung hukum untuk Ojol.</p> <p>2. Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh DPP Koalisi Ojol Nasional, BAM DPR RI menyampaikan tanggapan:</p> <p>1) BAM DPR RI mendukung sepenuhnya penyampaian aspirasi untuk membuat regulasi terkait ojol.</p> <p>2) BAM DPR RI mengagendakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pada tanggal 12 Mei 2025, untuk merumuskan seperti apa regulasi yang harus dibentuk, disusun agar memenuhi aspek keadilan, dan yang paling penting adalah keadilan sosial/perlindungan sosial. FGD menjadi forum bersama antara ojol, perusahaan aplikator, pemerintah untuk sama-sama merumuskan regulasi yang berkeadilan tanpa memihak</p> <p>3) Pembatasan pemotongan tarif oleh perusahaan aplikator sebaiknya dibatasi hanya sebesar 10%-15%.</p> <p>4) Perlindungan sosial untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan ojol, seperti BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan. Apabila dimungkinkan akan dimasukkan dalam Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh APBN.</p> <p>5) RDPU menghimpun Tuntutan Koalisi Ojol Nasional yang disampaikan adalah sebagai berikut.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1) Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Koalisi meminta pemotongan tarif 15% (tanpa potongan tambahan) dari pihak aplikator. 3) Menuntut hubungan kerja tetap dengan status kemitraan. 	
2.		<p>FGD (<i>forum discussion group</i>) dengan agenda Persiapan Telaah Aspirasi Masyarakat: Menuju Pengelolaan Aspirasi yang Responsif dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 24-26 April 2025.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAM mengapresiasi paparan Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.I.P., M.I.P (Anggota Ombudsman RI) yang berjudul Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. 2. Narasumber memaparkan penjelasannya mengenai tema tersebut, diantaranya sebagai berikut. 3. Pelayanan publik tidak akan berkualitas tanpa pengaduan masyarakat. Pengelolaan pengaduan dan aspirasi merupakan roh dari pelayanan publik. 4. Regulasi mengalami perkembangan yang begitu cepat, tetapi konstitusi menjadi acuan tertinggi. 5. Pengelolaan aspirasi akan memberi kemanfaatan dalam <i>sustainability sectoral</i>, yaitu penyelesaian kasus, mencari akar permasalahan, perbaikan layanan, juga perbaikan kebijakan. Pengelolaan aspirasi harus terkelola dengan baik. 6. Dalam mengelola aspirasi, basis data diperlukan. Di Indonesia sudah terdapat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - LAPOR yang mengintegrasikan seluruh pengaduan dari berbagai 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>institusi. BAM DPR RI bisa masuk sistem tersebut, dibuat khusus dan menjadi <i>dashboard</i> legislatif. Dengan hal tersebut, BAM DPR RI dapat menindaklanjuti dari database aspirasi pada sistem tersebut.</p> <p>7. Semakin banyak pengaduan yang terkonsolidasi dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintah.</p>	
3.	Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM)	RDPU dengan agenda Mendengarkan Aspirasi dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) terkait Penyelesaian KPKM dilaksanakan pada hari Rabu, 30 April 2025.	<p>1. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) menyampaikan aspirasi, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkumpulan KPKM merupakan komunitas konsumen Meikarta yang terdiri dari konsumen Meikarta yang telah tervalidasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan yang terdata adalah 118 orang. Perkumpulan KPKM sudah berjuang cukup panjang dalam memperjuangkan hak-hak konsumen Meikarta sejak macetnya proses realisasi pembangunan Meikarta 2) Perkumpulan KPKM mengapresiasi Kementerian PKP yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Lippo Group sebagai developer Meikarta untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dialami dan berkomitmen akan menyelesaikannya 3) Sejauh ini, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian PKP, sudah ada 400 konsumen Meikarta yang melaporkan hal serupa 4) Dalam pertemuan yang digelar di Kementerian PKP tanggal 23 April 2025, telah disepakati bahwa Lippo Group akan segera menyelesaikan kewajiban pengembalian dana kepada konsumen Meikarta yang tergabung dalam KPKM senilai Rp26,5 miliar, paling 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>lambat 3 (tiga) bulan setelah pertemuan atau maksimal tanggal 23 Juli 2025</p> <p>5) Terkait dengan pengembalian dana konsumen, saat ini telah ada 3 konsumen dari Perkumpulan KPKM yang mendapatkan pengembalian dana, meskipun 2 diantaranya tidak menerima secara utuh sebesar (100%) dari klaim yang diajukan, yang kurang bayar sekitar Rp6 Juta dan Rp14 juta</p> <p>6) Saat ini, Ketua Perkumpulan KPKM dalam memperjuangkan hal ini dihadapkan pada gugatan perdata oleh eks-konsumen Meikarta dan notaris di PN Bekasi. Hal tersebut mungkin dikarenakan Ketua Perkumpulan KPKM terlalu vocal dalam memperjuangkan hak-hak konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan KPKM. Selain itu, anggota Perkumpulan KPKM juga mendapatkan intimidasi dari pihak lain yang secara umum belum diketahui motifnya</p> <p>7) Terkait dengan gugatan yang dilayangkan kepada Ketua Perkumpulan KPKM dan intimidasi kepada anggota perkumpulan, sejauh ini masih belum diketahui berasal dari pihak mana, karena sampai saat ini Perkumpulan KPKM telah menjalin hubungan yang baik dengan Lippo Group (termasuk kepada pengembang dan manajemen Meikarta)</p> <p>8) Terkait dengan hal tersebut, Perkumpulan KPKM meminta kepada BAM beberapa hal sebagai berikut</p> <p>1. Meminta BAM DPR RI memberikan perhatian khusus pada permasalahan yang dialami oleh Perkumpulan KPKM dalam rangka melindungi hak-hak konsumen</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Meikarta secara khusus dan konsumen properti lainnya di Indonesia secara umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meminta BAM DPR RI memberikan perhatian khusus pada permasalahan yang dialami oleh Perkumpulan KPKM dalam rangka melindungi hak-hak konsumen Meikarta secara khusus dan konsumen properti lainnya di Indonesia secara umum 3. Meminta BAM DPR RI mengawal penyelesaian kasus ini agar benar-benar dikembalikan 100% hak konsumen sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Lippo Group dan Kementerian PKP 4. Meminta BAM DPR RI agar mendorong kepada Kementerian PKP untuk menyusun SOP terkait dengan pencairan hak-hak konsumen Meikarta yang telah disepakati pada tanggal 23 April 2025 antara konsumen, pengembang, dan kementerian agar pelaksanaan penyelesaian hak-hak konsumen berjalan sesuai dengan yang telah disepakati 2. Meminta kepada BAM DPR RI agar ikut serta mengawal kasus hukum yang dihadapi oleh Ketua Perkumpulan KPKM yang saat ini tengah bergulir di PN Bekasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan Perkumpulan KPKM, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: 2) BAM DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Perkumpulan KPKM yang telah menyampaikan aspirasinya melalui BAM DPR RI 3) BAM DPR RI meminta kepada Perkumpulan KPKM untuk menunggu implementasi kesepakatan bersama antara Perkumpulan KPKM, Lippo Group, dan 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kementerian PKP terkait penyelesaian hak konsumen Meikarta hingga tanggal 23 Juli 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Jika, dalam hal kesepakatan yang telah diputuskan bersama tersebut tidak dijalankan oleh Lippo Group, maka Perkumpulan KPKM dapat bersurat kembali kepada BAM DPR RI untuk meminta tindak lanjut dari penyelesaian masalah tersebut 5) BAM DPR RI akan memberikan dukungan secara moril terkait dengan kasus gugatan yang dialami oleh Ketua Perkumpulan KPKM di PN Bekasi tanpa melakukan intervensi terhadap kasus hukum yang sedang berjalan 6) BAM DPR RI meminta kepada Perkumpulan KPKM untuk menunjukkan bukti-bukti terkait dengan kasus hukum yang ketentuannya diduga tidak sesuai dengan prosedur, agar dapat diteruskan kepada Komisi III DPR RI agar mendapatkan perhatian khusus. 	
4.	Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	RDPU dengan agenda Mendengarkan Aspirasi dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait Ancaman terhadap Independensi Profesi Dokter Anak dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025.	<p>PP IDAI menyampaikan aspirasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Awal mula permasalahan mutasi dokter anak ini adalah pembentukan kolegium oleh Kemenkes RI. Mekanisme pembentukan kolegium ini melalui penunjukan langsung oleh Kemenkes RI. Pada Kongres IDAI Oktober 2024, PP IDAI ingin tetap mempertahankan status Kolegium berada di bawah organisasi, bukan berada di Kemenkes RI. Beberapa dokter anak yang tergabung pada PP IDAI yang menyampaikan pandangan kritis terhadap pembentukan Kolegium oleh Kemenkes tersebut dimutasi tanpa mekanisme yang jelas. 2. Dokter yang dimutasi antara lain, 1) Dr. dr. Hikari Ambara, Sp. A(K) dimutasi dari RSCM ke RS Harapan Kita, 2) Dr. dr. Fitri Hartanto, Sp.A(K) dimutasi dari RS Karyadi ke RS 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Sarjito yang sudah memiliki tiga dokter spesialis tumbuh kembang. C) dr. Piprim Yanuarso, Sp. A(K), dimutasi dari RSCM ke RS Fatmawati. d) dr. Rizky Adriansyah, Sp. A(K), diberhentikan mendadak dari RS Adam Malik. Mutasi dan pemberhentian tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dampak dari pembentukan Kolegium oleh pemerintah akan menyebabkan terganggunya independensi. Kegiatan penelitian dan pendidikan anak akan diintervensi pemerintah. Contohnya, pendidikan jantung pada umumnya dua tahun, pemerintah ingin hanya satu tahun 4. Perbedaan Kolegium PP IDAI dengan Kolegium Kemenkes (KKA) adalah tidak ada struktur ke bawah pada KKA, sehingga keberadaan dua Kolegium menjadi kontraproduktif 5. Di dalam UU Kesehatan, Kolegium dibentuk oleh para ahli, profesional dan guru besar. Di Indonesia ada 15 kampus yang melaksanakan pendidikan dokter anak 6. Kemenkes RI menilai Kolegium profesi menghambat pendidikan dan adaptasi dokter di Indonesia 7. Menurut PP IDAI Kolegium yang dibentuk oleh Kemenkes tidak sesuai dengan UU. Kemenkes RI membentuk Kolegium berdasarkan PP 28 tahun 2025 8. PP IDAI menilai mutasi sejumlah dokter merupakan tindakan kesewang-wenangan dan premanisme yang harus dihentikan 9. PP IDAI ingin semua yang dimutasi atau dipecat dibatalkan dan para dokter dikembalikan ke posisi semula <p>Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh PP IDAI, BAM DPR RI menyampaikan tanggapan:</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI mengapresiasi aspirasi yang telah disampaikan PP IDAI dan prihatin atas persoalan yang terjadi. 2. BAM DPR RI berpendapat bahwa persoalan ini disebabkan komunikasi yang kurang terbuka. Mutasi selayaknya dilaksanakan sesuai prosedur, bukan berdasarkan subjektivitas. Terhadap mutasi yang dinilai tidak sesuai prosedur, dapat dilakukan audit. 3. Apabila terjadi perbedaan tafsir terhadap UU (pihak yang berhak membentuk Kolegium), PP IDAI dapat meminta penafsiran dari fatwa Mahkamah Agung (MA). BAM DPR RI tidak bisa terlibat dalam persoalan dualisme yang merupakan ranah hukum. 4. Organisasi profesi dokter tidak boleh dikecilkan karena organisasi profesi memiliki peran dalam pengembangan dan pembinaan dokter. 5. Kemenkes RI seharusnya menjadi 'orang tua' bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga sikap kritis dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya dapat disikapi dengan bijak. 6. BAM DPR RI merekomendasikan kepada Komisi IX untuk meminta penjelasan kepada Kemenkes RI terkait mutasi para anggota IDAI. 	
5.	Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI)	RDPU dengan agenda Mendengarkan Aspirasi dari Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI) terkait Penyelesaian Permasalahan di Indofarma	<p>Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI) menyampaikan beberapa hal antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> a. FKPI menyampaikan apresiasi kepada BAM DPR RI yang telah mengundang FKPI dalam RDPU untuk menyampaikan beberapa hal penting menyangkut permasalahan yang dialami karyawan dan pensiunan PT Indofarma, dimana hak-hak karyawan dan 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025.</p>	<p>pensiunan yang belum dibayarkan hingga saat ini. Adapun jumlah potensi korban mencapai 1400 orang</p> <p>b. Para pensiunan, terutama pensiunan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang pensiun sebelum PT tersebut pailit, merupakan pihak yang paling terdampak karena belum dibayarkan haknya. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan harian, berobat, sekolah/kuliah, dsb hingga berhutang. Salah seorang pensiunan bahkan belum menyelesaikan hutangnya hingga meninggal dunia</p> <p>c. FKPI telah melakukan berbagai upaya melalui audiensi dengan perusahaan, perusahaan <i>holding</i>, pemerintah dan berkirim surat ke Presiden hingga ILO. FKPI juga sudah menempuh langkah hukum dan hasilnya PT Indofarma diminta membayar hak karyawan</p> <p>d. Rancangan penyelesaian melalui mekanisme penjualan aset kepada perusahaan <i>holding</i> sampai saat ini belum ada eksekusi. FKPI berharap BAM DPR RI mengakselerasi permasalahan ini dengan meneruskan ke Komisi VI agar memanggil Kementerian BUMN RI untuk mencari solusi konkrit.</p> <p>Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh FKPI, BAM DPR RI menanggapi bahwa:</p> <p>a. BAM DPR RI mengapresiasi FKPI yang telah mengadukan permasalahannya dan mempercayakan BAM DPR RI untuk memberikan atensi atas permasalahan yang dihadapi pensiunan Indofarma</p> <p>b. Persoalan ini terjadi karena perusahaan yang tidak sehat. Pemerintah hendaknya berlaku adil dalam penyelesaian</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kasus semacam ini. Pada kasus Sritex, respon pemerintah begitu cepat, sementara pada kasus Indofarma berbeda</p> <p>c. Hasil komunikasi dengan Wamen BUMN, Dony Oskaria, diperoleh informasi bahwa pemerintah menunggu rencana bisnis dari perusahaan <i>holding</i> (dalam hal ini PT Biofarma). Jika rencana bisnis tersebut sudah ada, maka hak-hak kepada karyawan dan pensiunan Indofarma akan dibayarkan dalam waktu tiga bulan</p> <p>d. Apabila dalam tenggang waktu selama 2 (dua) kali masa sidang permasalahan pensiunan Indofarma tidak terselesaikan maka BAM DPR RI dapat mengambil alih proses penyelesaiannya</p> <p>BAM DPR RI merekomendasikan Komisi VI untuk mendorong pemerintah (dalam hal ini Kementerian BUMN RI) untuk berlaku adil dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah. BAM DPR RI juga merekomendasikan Komisi IX untuk meminta penjelasan dari Kemenaker RI dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai persoalan jaminan ketenagakerjaan bagi karyawan dan pensiunan perusahaan yang bermasalah.</p>	
